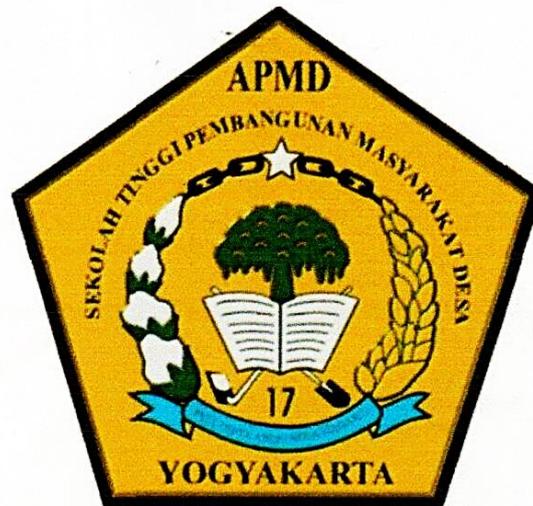


SKRIPSI

**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

**(Studi Kasus di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)**



Disusun Oleh:

FULGENSIUS ARIANTO MONE

18520080

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

2024



HALAMAN JUDUL

STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN

USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(Studi Kasus di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel,

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

FULGENSIUS ARIANTO MONE

18520080

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” di Yogyakarta pada:

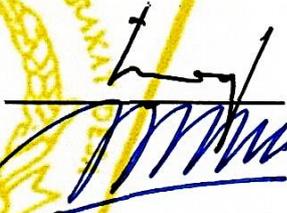
Hari : Rabu

Tanggal : 31 Juli 2024

Waktu : 10.30 s/d 11.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
<u>Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si</u> Ketua Penguji/Pembimbing	
<u>Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si</u> Penguji Samping 1	
<u>Utami Sulistiana, S.P., M.P</u> Penguji Samping 2	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan




Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fulgensius Arianto Mone

Nim : 18520080

Progam Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH” yang berpenelitian di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2024



Fulgensius Arianto Mone

18520080

MOTTO

Amsal 9:9

"Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah"

Suster M. Fransita, FCh

"Dirimu sungguh berharga karena tidak pernah ada orang yang sama seperti dirimu, baik di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan"

St. Josemaria Escriv

"Cintai Bunda kita. Dan Ia akan memperoleh rahmat yang berlimbah-limpah untuk membantumu mengalahkan pergumulanmu sehari-hari."

Alm. Sebastianus Milla Ngara

"Keluarlah menjelajah alam yang luas, maka anda akan menjelajah arti dari sebuah kehidupan"

Imam Syafi'i

"Barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya."

Albert Einstein

"Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta."

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa bersyukur, bangga dan cinta yang tulus kepada orang-orang terkasih yang telah mendukung penulis dengan caranya masing-masing:

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria yang oleh karena berkat, kebaikan, anugerah dan kasih setia-Nya dalam hidup penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Agustinus Mone Kii dan Ibu Margaretha Lali Bili. Terima kasih atas segala pengorbanan, cinta kasih dan dukungan yang diberikan selama ini hingga saya dapat menyelesaikan studi. Semoga bapak dan mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. Bapak Alfonsus Dedo Ngara dan Ibu Yuliana Niga Malo. Terima kasih atas doa dan dukunnya terhadap saya selama masa menempuh studi hingga saat ini.
4. Untuk saudara kandungku Alti, Mensi, Erna Desi dan Sepupu Alm Tian, Ince, Dewa, Anis, Sebas, Domi, Nita, Marsel, Clara, Jeni, Delsi, Diven, Okta., Terima kasih sudah ikut serta mendukung, mendoakan dalam proses menempuh pendidikan selama ini.
5. Untuk sahabatku Rusdi, Alvin, Anugrah, Esi Yaku Danga, Teo, Olus, Juven, Rejon, Yansen, frido, No Niron, Lensa, Angga, Hendrik, Aldo, Ken, Sindra. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini, semoga kita bisa sukses bersama kedepannya.
6. Kepada teman-teman seangkatan 2018 Juven, Frido, Ega, Sindra, Aldi, Olus, Adris, Sandi, Agus, Sherly, Ayu, Elton, Irene dan teman yang tidak

bisa saya sebut satu per satu. Terima kasih karena selalu menyemangati, membantu dan mendorong saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Teman-teman Organisasi Pekaweti dan SWF Yogyakarta. Terima Kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
8. Kepada Alm. Kakek Ghale, Alm Kakek Bili, Alm Kakek Nani, Alm Nenek Lali, Alm Nenek Daido, Alm kakak Sebastianus Milla Ngara. Saya persembahkan Skripsi ini sebagai bentuk penghormatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH” yang dilakukan di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”. Sehingga skripsi ini dapat menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi referensi, penghimpunan data maupun kesimpulan, sehingga harapannya dapat disempurnakan oleh peneliti lain pada kemudian hari. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang mendukung hingga selesainya skripsi ini dengan baik. Karena itu penulis hendak mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya selama masa studi.
2. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk belajar dan memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman akademik.
3. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku ketua program studi Ilmu

Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Desa “APMD”
Yogyakarta.

5. Ibu Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.
6. Bapak dan ibu dosen serta segenap karyawan program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pelayanannya selama penulis menempuh studi di kampus tercinta ini.
7. Kepada Perangkat Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terimakasih karena sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Kalurahan Lumbungrejo guna menyelesaikan tugas akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. <i>Literature Review</i>	7
F. Kerangka Konsep Penelitian.....	12
1. Strategi Pemerintah Desa	12
2. Pengembangan UMKM.....	16
3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa	21
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	22
H. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Unit Analisis Data	23
3. Metode Pengumpulan Data	26
4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	27
5. Teknik Analisis Data	28
BAB II PROFIL KALURAHAN LUMBUNGREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	30
A. Sejarah Kalurahan Lumbungrejo	30
B. Kondisi Geografis	31
C. Kondisi Demografis	32
1. Data Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah Padukuhan	32

2.	Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	33
3.	Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	34
4.	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	37
5.	Data Penduduk Berdasarkan Agama	38
D.	Potensi dan Masalah	39
1.	Potensi	39
2.	Masalah	41
E.	Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan	43
1.	Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo	43
2.	Badan Permusyawaratan Kalurahan.....	46
3.	Badan Usaha Milik Kalurahan	47
4.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	47
5.	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.....	49
6.	Karang Taruna.....	50
7.	Kelompok UMKM	52
BAB III STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN LUMBUNGREJO DALAM PENGEMBANGAN UMKM		55
A.	Strategi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM	55
1.	Strategi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan	55
2.	Fasilitasi Kelompok UMKM oleh Pemerintah Kalurahan	67
B.	Dampak Pengembangan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian...	81
1.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa.....	81
2.	Ketersediaan Lapangan Kerja	85
C.	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat	88
1.	Faktor Pendukung	88
2.	Faktor Penghambat.....	92
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		94
A.	Kesimpulan	94
B.	Saran	97
DAFTAR PUSTAKA		99
LAMPIRAN.....		102

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian.....	25
Tabel 2.1. Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Padukuhan.....	32
Tabel 2.2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	33
Tabel 2.3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.....	35
Tabel 2.4. Data Penduduk Berdasarkan Umur.....	37
Tabel 2.5. Data Penduduk Berdasarkan Agama.....	38
Tabel 2.6. Profil Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo.....	45
Tabel 2.7. Daftar Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan Lumbungrejo...	46
Tabel 2.8. Daftar Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan.....	47
Tabel 2.9. Daftar Pengurus LPMK Lumbungrejo.....	48
Tabel 2.10. Daftar Tim Penggerak PKK Kalurahan Lumbungrejo.....	49
Tabel 2.11. Daftar Pengurus Karang Taruna Lumbungrejo.....	50
Tabel 2.12. Daftar Pengurus UMKM.....	52
Tabel 2.13. Daftar Usaha Anggota Kelompok UMKM.....	52

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Struktur Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo.....	44
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Penyelenggaraan Event UMKM Kalurahan Lumbungrejo.....	66
Gambar 3.1. Fasilitas Payung Kerucut, Meja, Rombong/Lapak Jual.....	73

INTISARI

Penelitian ini mengkaji tentang strategi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Lumbungrejo. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan sulitnya pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya karena mengalami keterbatasan finansial atau modal usaha, pemasaran produk yang belum optimal dan perihal keberadaan kelompok UMKM yang belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta”?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menjangkau informasi faktual perihal strategi pemberdayaan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data maupun informasi yang telah peneliti himpun kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan telah menerapkan beberapa strategi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, yaitu: 1) rencana pembangunan *rest area*; 2) bekerja sama dengan pihak eksternal; 3) pengembangan konsep Desa Preneur; dan 4) penyelenggaraan *event*. Dari keempat strategi tersebut yang sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yaitu hasil dari kerja sama dengan pihak eksternal dan penyelenggaraan *event*. Selain itu, pemerintah Kalurahan Lumbungrejo juga memfasilitasi para pelaku UMKM dalam hal: 1) pembentukan kelompok dan pengurus UMKM; 2) pemberian fasilitas penunjang berupa payung kerucut, meja dan lapak jualan bagi para pelaku usaha yang membutuhkan; 3) mengusahakan modal usaha bagi kelompok UMKM melalui kerja sama dengan pihak eksternal; dan 4) memfasilitasi pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM. Sementara dampak pengembangan UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat sejauh ini masih belum signifikan. Tetapi secara bertahap, khususnya pendapatan para pelaku UMKM dari hasil usahanya sudah mengalami peningkatan. Adapun faktor pendukung dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo yaitu tersedianya kelompok UMKM sebagai wadah dalam mengembangkan usaha masyarakat, tersedianya potensi pangan lokal yang dapat diolah sebagai komoditas usaha, dan memiliki potensi pasar yang strategis. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya modal usaha dan fasilitas pendukung bagi para pelaku usaha, kelompok UMKM belum berjalan efektif, pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah Kalurahan juga belum maksimal, serta masih minimnya inovasi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan, UMKM, Pemerintah Desa, Perekonomian Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk mensejahterakan individu maupun kelompoknya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan juga dalam tumbuhnya ekonomi serta tenaga kerja dan distribusi hasil pembangunan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa dipandang memiliki prospek masa depan yang baik. Manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perekonomian nasional antara lain: membuka lapangan pekerjaan, menjadi penyumbang terbesar nilai produk domestik bruto, salah satu solusi efektif bagi permasalahan ekonomi masyarakat kelas kecil dan menengah.

Sedangkan manfaat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa bagi perekonomian Daerah adalah meningkatkan pendapatan, memberdayakan masyarakat khususnya perempuan, mendapatkan pengalaman berwirausaha, memperkecil angka pengangguran di Desa, mempererat rasa kebersamaan, mengembangkan potensi masyarakat, mengembangkan usaha yang telah ada sebelumnya, serta menumbuhkan rasa ingin maju dan sebagainya, (Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, Januari 2023) Kalurahan Lumbungrejo adalah sebuah Kalurahan berada di Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Kalurahan Lumbungrejo yang dikelilingi oleh kebun pertanian salak yang berada di bawah kaki gunung Merapi.

Pemilihan Kalurahan Lumbungrejo yang dijadikan objek penelitian dibandingkan dengan Kalurahan lain yang berada di Kapanewon Tempel, karena Kalurahan Lumbungrejo memiliki banyak potensi produk UMKM baik dari hasil perkebunan, pertanian, dan kerajinan lainnya seperti: keripik pisang, keripik singkong, kopi, keripik talas, jajanan pasar, sayuran, kerajinan anyaman bambu, anyaman dari daun pandan, ranginang dari beras ketan, rangining dari singkong, budi daya ikan mass, ikan lele, ikan mujair, budi daya kambing, dan lain sebagainya. (Hasil Wawancara Terhadap Pelaku UMKM).

Kemandirian masyarakat seperti para pelaku bisnis UMKM ini diharapkan akan mampu mengurangi angka pengangguran. UMKM dapat menjadi solusi atas masalah lapangan pekerjaan yang semakin terbatas dengan jumlah tenaga kerja yang belum terserap terus bertambah. Dengan kalimat lain, keberadaan UMKM ini menjadi salah satu penggerak ekonomi atau meningkatkan perekonomian, mengurangi pengangguran, serta menjadikan masyarakat yang produktif dan inovasi (Vanti Darmin, *Governing Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan UMKM Pengrajin Batik di Tengah Pandemi Covid-19*, 2022). Arus globalisasi menuntut perusahaan yang berada pada tingkat mikro ekonomi untuk dapat meningkatkan efisiensi produksinya agar tetap bertahan ditengah persaingan global yang mencakup lingkup lokal, nasional, dan internasional. Selain itu, kemampuan mengembangkan bisnis ke internasional telah menjadi satu elemen penentu dalam persaingan pada era Globalisasi (Lecerf, 2012).

Berdasarkan hasil observasi, survai dan wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa keberadaan UMKM merupakan salah satu potensi yang dimiliki Kalurahan Lumbungrejo. Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo saat ini memang sudah menaruh perhatian pada kelompok UMKM sebagai basis pendukung dan penguatan perekonomian Kalurahan. Dalam hal ini, keberadaan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo dapat diberdayakan dan dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah Kalurahan dan masyarakat setempat agar UMKM tersebut dapat memberi kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Namun pada kenyataannya di lapangan, tindakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan masih sangat minim dan belum optimal, sehingga sampai sekarang ini sebagian UMKM di Kalurahan Lumbungrejo masih berjalan di tempat atau belum mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan terdapat beberapa UMKM yang sama sekali tidak berjalan alias tutup (Hasil wawancara dengan Dwi Sulastri sebagai pelaku UMKM). Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM lainnya, juga menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan pelaku UMKM di Kalurahan Lumbungrejo adalah terkait dengan permodalan dan pemasaran produk hasil olahan mereka yang belum maksimal. Disamping itu, pemberdayaan yang dilakukan oleh Badan Usahan Milik Desa dan Koperasi yang ada di Kalurahan tersebut belum mampu memberikan hasil dan dampak yang maksimal terhadap perkembangan UMKM setempat. (Hasil wawancara dengan Nurhayati selaku ketua kelompok UMKM Lumbungrejo).

Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, menurut peneliti hal ini tidak bisa dilakukan hanya oleh pelaku UMKM itu sendiri, melainkan harus ada kerja sama dan kolaborasi antara para pelaku dan kelompok UMKM dengan beberapa pihak terkait seperti Pemerintah Kalurahan setempat, Dinas Koperasi dan UMKM serta dinas terkait lainnya, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi Desa dan masyarakat Kalurahan Lumbungrejo pada umumnya. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan perekonomian Kalurahan melalui pengembangan UMKM tersebut dapat diatasi secara bersama dan berkelanjutan. Namun kerja sama dan kolaborasi tersebut hingga saat ini belum terlaksana secara masif di Kalurahan Lumbungrejo.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan (LPPKal) Lumbungrejo Tahun 2021 di bidang pemberdayaan masyarakat, terdapat strategi yang diterapkan untuk meningkatkan perekonomian Kalurahan yaitu meliputi: pembinaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan kelompok pemerhati anak guna meningkatkan kapasitas perempuan, penyuluhan dan peningkatan manajemen UMKM agar UMKM semakin tertata dan berkembang pesat. Namun strategi tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena terdapat berbagai permasalahan yang berdampak pada perekonomian masyarakat. Masalah yang dialami Kalurahan Lumbungrejo dalam pemberdayaan UMKM yaitu karena pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat masih terhambat pada proses pemasaran untuk menjual output produk dari program yang sudah terlaksana, beberapa masyarakat yang masih sulit untuk diajak berkembang, dan masyarakat masih cenderung skeptis dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Kalurahan.

Berangkat dari penjelasan mengenai permasalahan yang dialami dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo di atas, menurut peneliti hal ini perlu disikapi oleh pemerintah Kalurahan setempat sebagai penyelenggara kewenangan lokal berskala Desa. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan dapat melakukan berbagai upaya guna memfasilitasi berbagai usaha masyarakat setempat dalam rangka pengembangan dan penguatan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Menurut peneliti, pada konteks ini pemerintah Kalurahan perlu memberikan motivasi-motivasi agar mendorong antusiasme masyarakat dalam mengembangkan usahanya, menjalin kemitraan dengan stakeholder lainnya guna kelancaran usaha masyarakat setempat, memfasilitas pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan keterampilan berwirausaha masyarakat, melakukan pendampingan, serta memberikan bantuan baik berupa modal usaha maupun fasilitas pendukung lainnya.

Oleh karenanya, melalui penelitian ini, peneliti hendak mengkaji lebih lanjut perihal bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam upaya mengembangkan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Penelitian ini merujuk pada konsep 5G Mazhab Timoho, salah satunya yaitu perspektif *governing*. Hal ini karena persepektif *governing* menekankan pada perbuatan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mengatur aspek kehidupan masyarakat. Sehingga perspektif ini sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian yaitu: “Bagaimana Strategi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan strategi Pemerintah kalurahan dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengetahuan para pelaku UMKM tentang Upaya pemerintah Kalurahan untuk mengembangkan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman.

2. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah untuk menambah referensi bagi para pelaku bisnis UMKM terkait upaya dari pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dalam penyelesaian masalah dibidang ekonomi.

E. Literature Review

Dalam mengkaji persoalan UMKM pada penelitian ini, peneliti juga merujuk beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu antara lain:

1. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jayakarta, penelitian oleh Winda Suci Lestari Nasution dkkzz (2021, Vol. 1 No. 1) Universitas Esa Unggul, Program Studi Politeknik Perdana Mandiri Purwarkarta yang berjudul “*Membangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*”. Hasil penelitian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia. UMKM juga merupakan salah satu penyokong perekonomian di Indonesia khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. UMKM memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akibat tidak terserapnya angkatan kerja dalam dunia kerja menjadi berkurang.
2. Jurnal Administrasi Publik, penelitian oleh Hanantyo Sri Nugroho (2018, Vol. 6 No. 1) yang berjudul “*Democratic Governance* (Studi mengenai Governability dalam Pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan

pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis e-commerce linear terhadap kualitas democratic governance, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan ewuhpekewuh. Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga konsesus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sikap partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki perkembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan implementasi kebijakan maupun program.

3. Jurnal Ilmiah Multi Disiplin, Penelitian oleh Asri Setiyani, dkk tahun (2022, Vol. 1 No. 3) yang berjudul “Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo” Peneliti ini melakukan observasi dengan metode wawancara terhadap 32 UMKM’ yang ada di Desa pekarungan dan di temukan menemukan potensi UMKM yang bisa digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja 91 dari 32 pelaku usaha. Selain itu produk yang dihasilkan juga sudah dipasarkan di wilayah sidoarjo maupun luar Sidoarjo bahkan sampai luar pulau yang bisa dijadikan produk unggulan untuk Desa Pekarungan. untuk meningkatkan potensi yang sudah ada pada pelaku usaha tersebut perlu adanya upaya atau dorongan dari pemerintah seperti dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Perlu adanya peran dari pihak internal yaitu pelaku usaha dan eksternal yaitu peran dari pemerintah.

4. Jurnal Administrasi Publik penelitian oleh Feni Dwi Anggraeni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat tahun (2013, Vol. 1 No. 6) yang berjudul “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal” Penelitian ini bertujuan untuk mengeta’hui, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal pada kelompok usaha “emping jagung” Kalurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kendala dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada kelompok usaha “Emping Jagung” Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
5. Jurnal *Of Business and Econimic Researc*, penelitian oleh Ronda Deli Sianturi tahun (2020, Vol. 1 No. 1) yang berjudul “Manajemen Pemasaran Menggunakan Analisis SWOT Pada UMKM Guna Meningkatkan Daya Saing UMKM”. Berdasarkan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa kesimpulan untuk menentukan strategi pemasaran bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing UMKM tersebut, antara Analisis SWOT dapat dilakukan untuk melakukan analisis terhadap faktor – faktor lingkungan Eksternal juga Lingkungan Internal bagi pelaku UMKM. Selain itu, Analisis SWOT juga dapat digunakan untuk menentukan strategi pemasaran pada UMKM.
6. Jurnal *Dinamika Pemerintahan*, penelitian oleh Muhammad Safar Akbari, dkk (2023, Vol. 6 No. 2) yang berjudul “ Strategi Pemerintah Desa Berbasis

Pemberdayaan Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Umkm” Dengan adanya dukungan strategi yang diberikan oleh pemerintah desa dapat menghasilkan output berupa masyarakat yang sudah mampu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis dan mampu untuk menopang dan membantu perekonomian keluarga melalui proses pemberian daya dan pengkapasitasan sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai.

7. Jurnal Indonesia Journal of Halal, penelitian oleh Arif Pujiyono, dkk (2018, Vol. 1 No. 1) Yang berjudul “Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global” UMKM di Jawa Tengah merupakan bagian industri nasional yang memiliki peran besar terhadap perekonomian. UMKM (termasuk yang halal) di Jawa Tengah memiliki potensi untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat bersaing secara global melalui produk yang memiliki keunggulan kompetitif yang bersertifikasi halal. Daya saing produk UMKM masih rendah dan lebih dari 90 persen produk UMKM belum memiliki sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mendisain model dan strategi untuk mengembangkan UMKM halal di Jawa Tengah untuk meningkatkan profitabilitas serta dapat bersaing secara global.
8. Jurnal Abdi Masyarakat, penelitian oleh Nardi Sunardi dkk (2020, Vol. 2 No. 1) yang berjudul “*Peran Manajemen Keuangan dan Digital Marketing dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan bagi UMKM Pasar Modern Intermoda BSD City Kota Tangerang Selatan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat ini bekerjasama

dengan PT. Sarana Jakarta Ventura dan Pengelola Pasar Modern BSD City Tangerang. Dengan tujuan untuk memberikan motivasi bagi UMKM yang ada di pasar modern Intermoda BSD City, Tangerang Selatan agar dapat bangkit dan mandiri. Metode yang digunakan dalam Pengabdian ini adalah ceramah, diskusi, dan pemberian materi mengenai manajemen keuangan dan digital marketing serta strategi yang harus dijalankan oleh UMKM. Kesimpulan dari Pengabdian Kepada Masyarakat di Pasar Modern BSD City ini adalah UMKM membutuhkan bantuan dalam hal permodalan dan pendampingan agar dapat bangkit dan mandiri. Solusi yang diberikan adalah bantuan permodalan bagi UMKM oleh PT Sarana Jakarta Ventura dengan biaya administrasi yang ringan.

9. Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, penelitian oleh Hanantyo Sri Nugroho (2018, Vol. 6 No. 1) yang berjudul “*Democratic Governance* (Studi mengenai Governability dalam Pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan UMKM dengan berbasis *e-commerce linear* terhadap kualitas *democratic governance*, yakni pemberdayaan dan partisipasi. Selain itu, dalam penggunaan ruang dialog terdapat perasaan ewuh-pakewuh. Perasaan ini memiliki kelebihan dalam meredam konflik dan menjaga konsensus yang telah disepakati. Namun, disisi lain perasaan ini kemudian tidak melahirkan sikap partisipatif dalam memanfaatkan ruang publik untuk memperbaiki perkembangan UMKM. Dengan demikian, pemanfaatan ruang publik lebih digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan

implementasi kebijakan maupun program. Penggunaan komunikasi pemasaran oleh UMKM belum maksimal dikarenakan adanya keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemasaran tersebut (Chrismrdani, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif Pengetahuan, sikap, kepribadian Keuangan terhadap Perilaku Manajemen pada pelaku UMKM (Humaira & Sagoro, 2018).

Dari uraian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebaruan yang ada dalam penelitian ini adalah untuk memperluas lapangan pekerjaan, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan hasil olahan produksi UMKM menjadi produk yang bertahan di tengah persaingan global. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun dari beberapa penelitian terdahulu di atas di temukan juga hal yang serupa dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengembangkan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

F. Kerangka Konsep Penelitian

1. Strategi Pemerintah Desa

a. Pengertian Strategi

Strategi adalah sebuah alat yang digunakan dalam mencapai tujuan perusahaan atau lembaga yang tujuannya dalam jangka panjang serta program tindak lanjut prioritas alokasi sumber daya. Kotten dalam (Maulidiana 2018) mengemukakan bahwa strategi adalah suatu rencana seorang pemimpin dalam

rangka mencapai tujuan jangka panjang yang disertai dengan penyusunan cara atau upaya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sedangkan definisi strategi menurut Supriono merupakan suatu kesatuan program atau rencana organisasi atau lembaga yang disusun secara komprehensif yang tentunya diperlukan dalam semua kegiatan organisasi. Pada saat yang sama, strategi yang sudah diterapkan oleh suatu organisasi akan diterapkan sebagai basis keku'atan terpisah untuk penyesuaian dalam lingkungan yang terus berubah (Gustiman 2021).

Geoff Mulgan menyatakan, "*Public strategy is the systematic use of public resources and po'wers, by public agencies, to achieves public goods*". Strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan sendiri, lebih mengidentifikasi pada strategi bagi lembaga pembuat kebijakan (pemerintah). Dimana stra'teginya dibuat untuk dapat berguna sebagai sistem yang akan mengatu'r sumber daya yang tersedia melalui lembaga publik. Menurut definisi di atas, Geoff Mulgan, memaparkan strategi pengelolaan pemerintahan dalam lima (5) indikator yaitu: *Purposes* (Tujuan), *Environtment* (Lingkungan), *Direction* (Pengarahan), *Action* (Tindakan), dan *Learnin'g* (Pembelajaran) (Christian, 2020).

Rumusan strategi sebuah alat atau pedoman dari Lembaga pemerintahan yang digunakan dalam mencapai tujuan UMKM masyarakat yang lebih baik atau lembaga yang tujuannya dalam jangka panjang serta program tindak lanjut prioritas alokasi sumber daya. Strategi dalam pengembangan UMKM kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Lumbungrejo perlu adanya pertanggung jawaban dari pemerintah Kalurahan Lumbungrejo untuk membantu menstimuluskan pendapatan UMKM agar tetap stabil seperti pembinaan

marketing dan pelatihan manajemen usaha dan analisis SWOT. Menurut Solihin dalam (P. Anggraeni et al., 2017), analisis SWOT sendiri merupakan alat analisis yang bertahan paling lama dan banyak digunakan untuk melakukan analisis situasional dalam perumusan strategi. The StrengthsWeaknesses-Opportunities-Threats Matrix (SWOT Matrix) merupakan alat penting untuk membantu manajer mengembangkan empat jenis strategi, yaitu SO (strengths-opportunities), WO (weaknessesopportunities), ST (strengths-threats), dan WT (weaknesses-ancaman). Untuk menciptakan UMKM agar tetap bergerak dalam situasi ini pemerintah Kelurahan Pandowoharjo melahirkan beberapa program yang diarahkan pada pengembangan dan sasarannya adalah para pelaku bisnis UMKM Pengrajin Batik. Salah satu program yang dilakukan Kelurahan Lumbungrejo untuk membantu mempertahankan UMKM ialah melaksanakan bazar atau pameran potensi Kelurahan untuk memperkenalkan hasil dari program pelatihan yang ada di Kelurahan Lumbungrejo.

b. Pemerintah Desa

Menurut Inu Kencana dalam Ficayani (2017), Pemerintah merupakan sebuah ilmu dan seni, mengapa disebut seni karena sebenarnya beberapa pemimpin mampu menjalankan pemerintahan tanpa pendidikan dan karisma dan dapat menggerakkan roda pemerintahan. Sedangkan kenapa dikatakan sebagai sebuah ilmu karena harus memenuhi semua kondisi yang telah ditentukan oleh ilmu, yakni mampu dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material serta bentuk, sistem dan spesifik dan universal (Afriansyah et al. 2023).

Menurut Robert Mac Iver yang dikutip Inu Kencana dalam (Ramdan 2020) “*government is a organization of men under authority... how men can be*

govern”. Artinya pemerintah adalah suatu organisasi dari suatu kelompok pemegang kekuasaan dan bagaimana orang bisa diatur oleh pemerintah. Pemerintah yang dirujuk dalam teks tersebut adalah pemerintah yang ditunjukkan dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tampi and Tampongongoy 2021).

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dengan dibantu perangkat desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan Perangkat Desa meliputi: Sekretaris Desa dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaannya bidang lapangan dan pengelolaan unsur wilayah, dengan jumlah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sosial budaya setempat. Pemerintah desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang sangat besar pengaruhnya. Pelaksanaannya ditujukan untuk desa-desa. Pengurus unit organisasi pemerintah desa disebut sebagai aparatur negara, bukan pegawai negeri sipil, karena beberapa pertimbangan antara lain (Ramdan 2020):

- a. Konsisten dengan pengertian desa sebagai kesatuan ketatanegaraan.
- b. Perangkat tersebut, meskipun sering dipilih dari masyarakat desa setempat, tetapi yang mengangkat perangkat tersebut adalah pejabat yang memiliki wewenang.
- c. Tidak ditetapkan sebagai perangkat atau pejabat, karena kedudukan pegawai negeri diatur oleh undang-undang dan peraturan tertentu, yang tidak berlaku bagi aparatur pemerintah desa.

Peran Pemerintah Desa adalah mengarahkan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang dapat bertanggung jawab dan adil. Seperti yang kita tahu itu merupakan salah satu tugas pemerintah yakni menjamin pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan material desa. Tujuan pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan (Inderasari, Hamdi, and Maulana 2022).

Dalam menjalankan tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan wewenangnya. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan orang yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola potensi lokal desa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Desa adalah upaya untuk mencapai suatu tujuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Pengembangan UMKM

a. Pengertian UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usaha adalah kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar dan daya upaya) untuk mencapai sesuatu; kegiatan di bidang perdangan (dengan maksud mencari untung). Sedangkan pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pada Pasal 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

menerangkan bahwa: *Pertama*, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. *Kedua*, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. *Ketiga*, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

UMKM menjadi salah satu pilar terpenting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena berperan dalam memperbaiki perekonomian baik ditinjau dari jumlah usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk domestik bruto (PDB) (Sofyan, 2017). UMKM memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto sebesar 57 - 60% dan menyerap tenaga kerja 97% dari tenaga kerja nasional (Putra, 2016). Pasca krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 tidak mengurangi jumlah UMKM yang ada di Indonesia, justru meningkat bahkan mampu menyerap sebanyak 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun 2012 jumlah pelaku usaha di Indonesia sebanyak 56 . 534. 591 unit (Hamza & Agustien, 2019).

Namun UMKM di Indonesia masih memiliki permasalahan yang berarti, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya bimbingan dan

pembinaan, keterbatasan pengetahuan teknologi, permodalan, manajemen pengelolaan yang rendah, infrastruktur yang belum memadai, sulitnya memperoleh bahan baku, sulitnya memperoleh izin usaha atau badan hukum, dan keterbatasan dalam pemasaran (Amri, 2012). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mendorong pengembangan UMKM untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan memaksimalkan potensi UMKM.

Menurut Rahmana (2008), beberapa lembaga atau instansi bahkan memberikan definisi tersendiri pada Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Sementara itu, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan entitas usaha milik Warga Negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan (Kementerian Koperasi dan UMKM dalam AUFAR (2014:8).

Berdasarkan definisi di atas, pada intinya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha tertentu yang memenuhi

kriteria sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di mana pada konteks masyarakat pedesaan, pada umumnya usaha mereka tergolong dalam usaha mikro kecil dan menengah karena cenderung bersifat industri rumahan dan olahan hasil pangan lokal yang skala produksinya masih terbatas.

b. Kriteria Usaha Kecil Dan Menengah

Berdasarkan Perkembangan, selain berdasar Undang-undang tersebut, dari sudut pandang perkembangannya Rahmana (2008) mengelompokkan UMKM dalam beberapa kriteria, yaitu:

- a) *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.
- b) *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor
- d) *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Kecil Menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

c. Pengertian Pengembangan

Sugiyono (2015:5) menyatakan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Pada hakikatnya pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka

memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh, selaras, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuan, sebagai bekal atas prakarsa sendiri untuk menambah, meningkatkan, mengembangkan diri kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal serta pribadi yang mandiri.

Ardhana dalam (Irfandi, 2015:64) mengartikan, pengembangan merupakan pemakaian secara sistematis pengetahuan ilmiah yang diarahkan pada proses produksi bahan, sistem, atau metode termasuk perancangan berbagai prototype.

National Science Board dalam (Putra, 2012:70) mendefinisikan pengembangan sebagai aplikasi sistematis dari sebuah pengetahuan atau pemahaman yang diarahkan pada produksi barang yang bermanfaat Sedangkan menurut Tessmer dan Richey dalam (Prasetyo, 2014:7) pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisis kontekstual dimana pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.

Dari penjelasan pengertian tentang UMKM dan pengembangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian bantuan modal, fasilitas, pelatihan dan bimbingan, pendampingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM.

3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa

a. Pengertian Perekonomian Desa

Perekonomian desa adalah serangkaian besar kegiatan produksi dan konsumsi yang saling terikat serta membantu dalam menentukan bagaimana sumber daya langka dalam desa itu sendiri untuk dialokasikan dan dimanfaatkan secara baik dan benar.

Konsep pembangunan nasional yang diimplementasikan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu kebijakan membangun Indonesia dari desa (Fahrial, Tama & Dewi, 2019).

Ekonomi Desa yaitu berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa (Suhardjo, 2008). Artinya kegiatan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada profesi petani. Pernyataan ini dianggap sesuai dengan gambaran kondisi pedesaan saat ini. Salah satu kiat untuk membangun desa yaitu dengan cara menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* dan kreatifitas melalui pengembangan ekonomi dan industri kreatif (Hamid & Iqbal, 2017). Dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat desa tidak hanya berkutat pada profesi petani dan nelayan saja. Sebab berbagai macam sektor industri seperti pariwisata maupun industri kreatif, saat ini dapat menjadi tumpuan bagi peningkatan perekonomian di sebuah desa. Semakin berkembangnya sektor ini, lapangan pekerjaan di sebuah desa menjadi lebih bervariasi.

b. Pengertian Peningkatan

Peningkatan adalah suatu proses atau perbuatan yang dapat dilakukan untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Menurut Moeliono, (2005) Peningkatan adalah Sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan Peningkatan Perekonomian Desa adalah untuk mencapai suatu tujuan atau berjalannya strategi yang dilakukan masyarakat Desa Lumbungrejo mengenai kebutuhan dan pendapatan masyarakat baik dalam usaha mikro maupun menengah sehingga perekonomian masyarakat semakin meningkat dan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dan masa yang akan datang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian Masyarakat Desa adalah suatu proses membangun perekonomian masyarakat dari tingkat terendah menuju ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek penelitian pada strategi pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia pada pegawai pemerintahan Kalurahan dan masyarakat pelaku UMKM

yang berkaitan dengan Strategi Pemerintah Kalurahan dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu meliputi:

1. Strategi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM
 - a. Pemberian Fasilitas Terhadap Pelaku UMKM
 - b. Pelatihan dan Pendampingan Terhadap Pelaku UMKM
2. Dampak Pengembangan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian
 - a. Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa
 - b. Ketersediaan Lapangan Kerja
3. Faktor Pendukung dan Penghambat

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Di mana peneliti akan menggambarkan kondisi, mencari penyebab dan akibat, serta memungkinkan peneliti menemukan solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan strategi pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo.

2. Unit Analisis Data

a. Subjek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan atau narasumber dimanfaatkan untuk memberikan informasi atau data dalam sebuah penelitian. Informan atau narasumber dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan sejauh mana Strategi Pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM untuk di

Kalurahan Lumbungrejo. Penentuan narasumber dalam penelitian ini diambil dengan teknik purposive. Konsep tentang purposive menurut (Jhon Crewswell, 2015: 217) digunakan dalam penelitian kualitatif. Hal ini berarti bahwa sang peneliti memilih individu-individu dan tempat untuk diteliti karena mereka secara spesifik memberi pemahaman tentang problem riset fenomena dalam studi tersebut.

b. Objek Penelitian

Obyek penelitian adalah penelitian eksplorasi yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activities) (Sugiyono, 2013: 229). Adapun obyek dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang berkaitan dengan strategi pengembangan UMKM oleh pemerintah Kalurahan di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

c. Informan

Informan merupakan orang yang mampu memberikan informasi tentang hal yang ingin diketahui penulis. Informan adalah orang yang mengetahui tentang kasus yang sedang diteliti atau orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti. Analisis data merupakan cara pengelolaan data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan. Pengelolaan data yang dimaksudkan untuk membuktikan keterangan yang dikemukakan oleh penulis. Sebelum melakukan analisis data berdasarkan hasil penelitian, terlebih dahulu menelaah mengenai informan yang akan ditinjau dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jumlah penduduk dan agama.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu berjumlah 6 orang, yang meliputi: Pemerintah Kelurahan (2 orang), Pengurus BUMKAL (1 orang), dan Pelaku UMKM (3 orang). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang peneliti tetapkan atas dasar kriteria dan pertimbangan bahwa informan tersebut benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan data yang akurat dan obyektif.

Tabel 1.1. Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Usia (Tahun)	Pendidikan	Pekerjaan
1.	M. Hisbah Alhakim	48	SLTA	Lurah
2.	Herman Subagya	46	SLTA	Carik
3.	Handayatman	59	SLTA	Pengurus BUMKAL
4.	Nurhayati	30	SD	Pelaku Usaha Katering Leenok Food
5.	Lin Kotimah Iffah	38	SLTA	Pelaku Usaha Jajanan Pasar
6.	Dwi Sulastri, S.Si	50	S1	Pelaku Usaha Kuliner

(Sumber: Data Dioalah 2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Di mana yang lulusan SD/ sederajat 1 orang, lulusan SLTA/ sederajat 4 orang dan lulusan strata satu (S1) 1 orang. Sedangkan secara usia, para informan dalam penelitian ini yaitu berusia 30-50 tahun. Di mana hal ini menunjukkan bahwa informasi dan data yang diberikan dapat disesuaikan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka terkait dengan permasalahan yang diteliti, sehingga informasi dan data yang telah peneliti himpun dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam setiap penelitian diperlukan kemampuan memilih dan menyusun alat pengumpul data yang relevan. Kecermatan dalam memilih dan menyusun teknik dan alat pengumpul data ini sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Menurut Burhan Bungin (2007: 110), metode pengumpulan data kaulitatif yang paling independen adalah metode observasi, waawancara, dan dokumentasi, yang kemudian didefinisikan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya, seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Adapun hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa masih sulitnya pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya karena mengalami keterbatasan finansial atau modal usaha, pemasaran produk yang belum optimal dan keberadaan kelompok UMKM yang belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang meliputi: Pemerintah Kalurahan (2 orang), Pengurus BUMKal (1 orang), dan Pelaku UMKM (3 orang). Di mana keenam informan tersebut telah memberikan informasi

dan data yang berkaitan dengan pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan sebagainya. Dalam metode ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri data historis Kalurahan Lumbungrejo seperti profil Kalurahan, daftar pengurus kelompok UMKM, daftar usaha anggota kelompok UMKM dan foto-foto kegiatan kelompok UMKM.

4. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian diperlukan teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan beberapa teknik seperti persistent observation (observasi berlanjut), triangulasi, maupun peerderieting (pemeriksaan sejawat melalui diskusi) (Moleong, 2012: 330).

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu sendiri. Adapun langkah operasionalnya dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara;

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa dikatakan secara pribadi;
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang penelitian; dan
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang dari berbagai kalangan seperti orang biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang pemerintahan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Sugiyono dalam Rustanto, (2015) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan (observasi), dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada tahap analisis kualitatif ini, penelitian menggunakan beberapa tahap, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Deskripsi berisi apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami sendiri, oleh peneliti. Sedangkan catatan refleksi

yaitu catatan yang memuat kesan, komentar, tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penelitian, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay-kan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, teks, transkrip dan lainnya yang paling banyak dipergunakan. Dengan mendisplay-kan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

d. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan dan perasaan yang sering dan dituangkan dalam kesimpulan. Dalam penelitian ini, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari seangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian.

BAB II

PROFIL KALURAHAN LUMBUNGREJO, KAPANEWON TEMPEL, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah Kalurahan Lumbungrejo

Pada tahun 1947, Kalurahan Lumbungrejo terdiri dari gabungan 2 (dua) Kalurahan otonom, yakni: Kalurahan Tempel dan Kalurahan Kromodangsan. Pada masa itu, Kalurahan Tempel Lurahnya adalah Bapak Hisam, sedangkan Kalurahan Kromodangsan Lurahnya yaitu Bapak Prawiro Sudarmo. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pada saat itu yang masih merupakan masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, sehingga banyak wilayah administrasi yang di tata ulang pemerintah.

Hasil penggabungan Kalurahan/Desa ini dilakukan dengan Maklumat Sultan Nomor 5 Tahun 1946. Pada masa-masa itu Kabupaten Sleman semulanya terdiri dari 262 Kalurahan, dan setelah dilakukan penggabungan atau blengketan pada beberapa Kalurahan otonom, akhirnya tinggal menjadi 86 Kalurahan/Desa. Kemudian, dalam proses penggabungan Kalurahan Tempel dan Kalurahan Kromodangsan menjadi Kalurahan Lumbungrejo juga diikuti dengan perubahan struktur pemerintah Kalurahan pada tahun 1948, dimana Bapak Hisam kembali terpilih menjadi Lurah Kalurahan Lumbungrejo.

Dengan demikian, bapak Hisam tercatat sebagai Lurah pertama di Kalurahan Lumbungrejo mulai dari tahun 1948 sampai pada tahun 1964. Kemudian Lurah berikutnya dilanjutkan oleh Bapak Siswo Sumadi (1964-1997); Mahmud Husni (1997-2012); Imam Suhadi (2012-2021); dan Lurah sekarang ini

M. Misbah Alhakim (2021-2026). Lebih lanjut, pada masa-masa awal pembentukannya, Kalurahan Lumbungrejo belum memiliki kantor, sehingga masih berpindah-pindah di tempat siapa yang menjadi Lurah. Barulah pada tahun 1977 Bapak Siswo Sumadi membangun Kantor Kalurahan Lumbungrejo di tanah kas Desa, yang terletak di Padukuhan Tempel yang dekat dengan jalan negara Yogyakarta-Magelang hingga sekarang.

B. Kondisi Geografis

Secara administratif Kalurahan Lumbungrejo merupakan salah satu Kalurahan dari Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta. Adapun luas wilayah Kalurahan Lumbungrejo yaitu 330.336 Ha dengan rincian: tanah sawah sebesar 167.662,5 Ha; tanah kering sebesar 168.662,5 ha; dan tana untuk keperluan fasilitas umum sebesar 3,57 ha. Letak wilayah Kalurahan Lumbungrejo di sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Merdikorejo; sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Margorejo; sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Pondokrejo; dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Krasak/Magelang.

Lebih lanjut, jarak tempuh Kalurahan Lumbungrejo ke pusat Kapanewon yaitu 0,1 Km; ke pusat Kabupaten 8 Km; dan ke pusat Provinsi sejauh 17 Km. Adapun jarak Padukuhan terjauh dari kedudukan Kalurahan Lumbungrejo yaitu sejauh 3 Km. Kalurahan Lumbungrejo berada pada ketinggian 382 mdpl, dengan suhu maksimum 33°C dan suhu minimum 21°C.

C. Kondisi Demografis

Secara umum, Kalurahan Lumbungrejo memiliki total jumlah penduduk sebanyak 7.796 jiwa, yang berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki sebanyak 3.916 jiwa dan perempuan sebanyak 3.880 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut, menunjukkan bahwa populasi laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Berikut ini adalah jumlah penduduk Kalurahan Lumbungrejo berdasarkan beberapa kriteria:

1. Data Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah Padukuhan

Adapun data penduduk Kalurahan Lumbungrejo berdasarkan populasi wilayah Padukuhan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1. Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Padukuhan

No.	Nama Padukuhan	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Bibis	4	243	692
2.	Kopen	6	245	723
3.	Krasakan	6	293	821
4.	Kromodangsan	4	298	865
5.	Lodoyong	10	447	1323
6.	Molodono	4	218	636
7.	Ngepos	6	202	549
8.	Sedogan	5	228	695
9.	Tempel	6	321	916
10.	Wonokerso	5	208	576
Total		56	2.703	7.796

(Sumber: Data Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Jika dilihat dari data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Kalurahan Lumbungrejo memiliki 10 Padukuhan, 56 RT dan sebanyak 2.703 KK. Data di atas menunjukkan bahwa Padukuhan Lodoyong memiliki jumlah RT paling banyak, yaitu 10 RT dan sekaligus merupakan Padukuhan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 1.323 jiwa. Akan tetapi, secara jumlah penduduk juga tidak terlalu jauh dari Padukuhan Tempel yang hanya memiliki 6

RT dengan jumlah 916 jiwa. Sedangkan Padukuhan yang paling sedikit penduduknya yaitu Padukuhan Ngepos dengan jumlah 549 jiwa.

2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Adapun data penduduk Kalurahan Lumbungrejo berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kelompok Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak/Belum Sekolah	1004
2.	Tamat SD/ sederajat	1642
3.	Tidak Tamat SD/ sederajat	944
4.	Tamat SLTP/ sederajat	1355
5.	Tamat SLTA/ sederajat	2317
6.	Diploma I/II	82
7.	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	111
8.	Diploma IV/ Strata I	320
9.	Strata II	17
10.	Strata III	4
Total		7.796

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo 2023)

Dari data di atas, menunjukkan bahwa secara tingkat pendidikan lebih banyak masyarakat Kalurahan Lumbungrejo yang lulusan SLTA/ sederajat dengan jumlah 2.317 jiwa. Tetapi, dari angka tersebut nampaknya tidak banyak juga yang kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memperoleh gelar Diploma hingga Sarjana yang masih minim, jika ditotalkan hanya mencapai 534 jiwa. Sedangkan sebanyak 4.945 jiwa penduduk hanya memperoleh pendidikan SLTP/ sederajat ke bawah. Dan secara spesifik, penduduk yang tidak/ belum sekolah, tidak tamat SD dan hanya tamat SD juga menunjukkan angka yang cukup tinggi dengan total jumlah sebanyak 3.590 jiwa.

Menurut peneliti, penduduk yang tidak/belum sekolah, tidak tamat SD dan hanya tamat SD/ sederajat merupakan tingkat pendidikan yang sangat rentan dan jika dikaitkan dengan dunia kerja maka termasuk dalam kategori pekerja tidak terampil (*unskills worker*). Dengan total jumlah mereka yang begitu banyak, maka ini juga perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dalam hal memberikan pelatihan dan pemberdayaan agar mereka juga memiliki daya saing. Selain itu, penduduk yang lulusan SLTP, SLTA, Diploma dan Sarjana juga perlu dimaksimalkan keterampilannya agar mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Kalurahan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Lumbungrejo secara umumnya.

Lebih lanjut, menurut peneliti potret tingkat pendidikan masyarakat di Kalurahan Lumbungrejo juga masih mengalami ketimpangan yang cukup tinggi, sehingga semua ini perlu ditangani lebih baik lagi kedepannya. Karena menurut peneliti, hal ini sangat mempengaruhi tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri. Sebab, pendidikan dan keterampilan merupakan syarat utama bagi masyarakat dalam mengembangkan segala potensi yang ada.

3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Adapun data penduduk Kalurahan Lumbungrejo berdasarkan pekerjaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Pelajar/Mahasiswa	1720
2.	Mengurus Rumah Tangga	1463
3.	Belum/tidak berkerja	1184
4.	Buruh harian lepas	1033
5.	Karyawan swasta	834
6.	Wiraswasta	518
7.	Buruh Tani/Perkebunan	209
8.	Pedagang	187
9.	Pensiunan	133
10.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	111
11.	Petani/Perkebunan	85
12.	Guru	59
13.	Sopir	42
14.	Karyawan Honorer	35
15.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	32
16.	Kepolisian RI (POLRI)	24
17.	Pemerintah Desa	21
18.	Karyawan BUMN	18
19.	Tukang Batu	16
20.	Perawat	10
21.	Tukang Jahit	9
22..	Mekanik	9
23.	Karyawan BUMD	6
24.	Apoteker	5
25.	Dosen	5
26.	Bidan	5
27.	Industri	4
28.	Ustadz/Mubaligh	4
29.	Dokter	3
30.	Lain-lain	12
Total		7.796

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Lumbungrejo adalah pelajar/mahasiswa dengan jumlah sebanyak 1.720 jiwa, yang artinya Kalurahan Lumbungrejo memiliki generasi terdidik dan terpelajar yang cukup banyak. Kemudian, jumlah penduduk terbanyak kedua disusul oleh pekerjaan mengurus rumah tangga sebesar 1.463 jiwa dan merupakan perempuan semua, dimana hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perempuan Lumbungrejo lebih memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dibandingkan

menjadi perempuan karier di ranah publik. Selain itu, jumlah penduduk yang belum/tidak berkerja juga menempati posisi ke tiga terbanyak dengan jumlah 1.184 jiwa.

Menurut peneliti, penduduk dengan status pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa, pengurus rumah tangga dan yang belum/tidak berkerja merupakan penduduk yang dikategorikan tidak berpenghasilan. Artinya, jika jumlah ketiga jenis pekerjaan ini ditotalkan, maka terdapat sebanyak 4.340 jiwa penduduk Kalurahan Lumbungrejo yang tidak berpenghasilan. Disisi lain, penduduk Lumbungrejo yang berkerja sebagai buruh harian lepas juga menduduki posisi terbanyak ke empat. Sekalipun pekerjaan ini berpenghasilan, namun sayangnya selalu tidak menentu sehingga pekerjaan dengan profesi ini selalu berada dalam kondisi yang rentan.

Dari data penduduk menurut pekerjaan di atas, menunjukkan bahwa Kalurahan Lumbungrejo tidak seperti Kalurahan/Desa pada umumnya, dimana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani/perkebunan. Karena penduduk Lumbungrejo yang berkerja sebagai petani/perkebunan hanya berada pada angka 209 jiwa, lebih rendah dari jumlah karyawan swasta sebanyak 834 jiwa dan wiraswasta sebanyak 518 jiwa. Jika dilihat dari data semua jenis pekerjaan di atas, sektor swasta dan dunia usaha juga cukup berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Kalurahan Lumbungrejo.

4. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Adapun data penduduk Kalurahan Lumbungrejo berdasarkan kelompok umur yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4. Data Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Jiwa
1.	0 – 1	58
2.	2 – 14	1594
3.	15 – 19	489
4.	20 – 29	1100
5.	30 – 39	1037
6.	40 – 49	1213
7.	50 – 59	1218
8.	60 – 69	689
9.	70 ke atas	398
Total		7.796

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi masyarakat Lumbungrejo lebih banyak yang berusia 50 s/d 59 tahun dengan jumlah sebanyak 1.218 jiwa. Menurut peneliti, kelompok umur yang demikian merupakan usia yang hampir tidak produktif lagi dalam dunia kerja diberbagai sektor karena usia yang sudah terbilang tua. Tetapi usia kerja di Indonesia secara umum rata-rata berusia 17 s/d 60 tahun.

Berdasarkan data di atas, maka skenario usia kerja di Kalurahan Lumbungrejo dapat pula dipatok mulai dari usia 20 s/d 59 tahun. Jika dihitung dari kelompok usia 20 s/d 59 tahun, maka Kalurahan Lumbungrejo memiliki jumlah usia kerja sebanyak 4.568 jiwa. Dalam hal ini, usia angkatan kerja merupakan yang dominan di Kalurahan Lumbungrejo jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dikategorikan usia pendidikan (19 tahun ke bawah) dan masyarakat lanjut usia (60 tahun ke atas). Dengan demikian, hal ini telah menunjukkan bahwa Kalurahan Lumbungrejo sejatinya memiliki potensi SDM

yang sangat besar. Namun yang masih menjadi tantangannya adalah masalah pendidikan dan keterampilan masyarakatnya yang mesti ditingkatkan secara terus-menerus.

5. Data Penduduk Berdasarkan Agama

Adapun data penduduk Kalurahan Lumbungrejo berdasarkan agama/aliran kepercayaan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5. Data Penduduk Berdasarkan Agama

No.	Agama/Kepercayaan	Jumlah Jiwa
1.	Islam	7.649
2.	Katholik	91
3.	Kristen	55
4.	Budha	1
Total		7.796

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Mayoritas penduduk Kalurahan Lumbungrejo memeluk agama Islam dengan jumlah 7.649 jiwa, kemudian disusul oleh agama Katholik sebanyak 91 jiwa, Kristen 55 jiwa dan Budha 1 jiwa. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya terdapat 4 agama saja di Kalurahan Lumbungrejo, yaitu agama Islam, Katholik, Kristen dan Budha. Sedangkan untuk agama Hindu, Konghucu dan aliran kepercayaan lainnya tidak memiliki pemeluknya. Lebih lanjut, peneliti menyimpulkan bahwa sekalipun agama Islam merupakan yang terbesar, tetapi dengan adanya agama lain, maka hal ini telah menunjukkan bahwa masyarakat Lumbungrejo memiliki keberagaman, serta toleransi yang besar karena hingga saat ini belum pernah terjadi konflik antara umat beragama di Kalurahan Lumbungrejo.

D. Potensi dan Masalah

1. Potensi

Kalurahan Lumbungrejo mempunyai beragam potensi utama sebagai penopang perekonomian, diantaranya sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, serta pertambangan galian C berupa pasir dan batu kali di sepanjang kali Krasak. Wilayah Kalurahan Lumbungrejo secara umum mempunyai ciri fisik penggunaan lahan berupa: lahan pertanian terutama padi, jagung, sayuran serta kebun salak pondoh. Bahkan, pada musim penghujan petani bisa menanam padi dua kali, sedangkan pada musim kemarau petani lebih memilih menanam jagung dan sayuran karena keuntungan yang diperoleh juga lebih banyak daripada menanam padi. Hal tersebut juga dikarenakan pada musim kemarau kesulitan air dan kurangnya saluran irigasi yang memadai. Penjualan hasil pertanian biasanya melalui tengkulak, karena sarana belum ada dan tenaga panen sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan alat tanam maupun alat panen modern. Tetapi ada juga sebagian kecil petani yang menjual ke pasar atau konsumen secara langsung, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

Kalurahan Lumbungrejo juga memiliki potensi di sektor perternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta perdagangan/jasa yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu. Selain itu, Kalurahan Lumbungrejo juga memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk bahan galian golongan C pada saat terjadi erupsi, karena Kalurahan ini dilalui Sungai Krasak yang menjadi saluran lahar dingin dari gunung Merapi, sehingga potensi pasir dan batu kerikil di alur aliran sungai dan sekitarnya sangat besar.

Lebih lanjut, nilai-nilai budaya masyarakat di Kalurahan Lumbungrejo juga masih sangat kental dengan budaya Jawa. Hal ini dapat dimengerti karena tidak terlepas dari pengaruh adanya pusat kebudayaan Jawa yang tercermin dengan keberadaan Keraton Kasultanan maupun Pakualaman di Yogyakarta. Dari latar belakang budaya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Di dalam hubungannya dengan agama yang dianut misalnya, Islam sebagai agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat, dengan tradisi budaya Jawa maka kesenian-kesenian seperti Hadroh, Sholawatan, Kethoprak, Jathilan, kegiatan lain sebagai peringatan hari-hari besar islam/adat lainnya seperti Mauludan, Nyadran, Suran, Selikuran, Kenduri, Nyewu, Wiwitan, Kondangan, dst. Semua kesenian dan acara tersebut masih terlestarikan dengan baik sebagai perwujudan dari rasa syukur dan kerukunan warga masyarakat.

Selain potensi-potensi yang disebutkan di atas, Kalurahan Lumbungrejo juga memiliki potensi Wisata. Salah satu destinasi wisata di Kalurahan Lumbungrejo yang dapat dinikmati oleh wisatawan adalah "BON DARU" yang terletak di wilayah Padukuhan Krasakan. Obyek wisata ini diinisiasi oleh warga setempat dengan mengusung tema wisata alam dan tersaji aneka kuliner tradisional dengan harga sangat terjangkau. Destinasi wisata ini kemudian terus dikembangkan melalui program Desa wisata dengan menyasar lokasi seputar Sungai Krasak yang terletak tidak jauh dari Bon Daru dengan luas lahan yang tersedia sekitar 1000 meter persegi. Selain itu, wisata ini juga telah dilengkapi fasilitas seperti lokasi bermain anak, tempat olahraga senam, warung dengan sajian jadul seperti soto BonDaru dengan harga terjangkau, ada juga jajanan pasar

jadul dan jenang dengan harga terjangkau, serta warung soto. Oleh karenanya, baik pihak Kalurahan, LPMD, Dukuh dan warga semuanya berharap agar keberadaan usaha wisata ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat setempat.

2. Masalah

Selain beberapa potensi yang sudah peneliti uraikan pada bagian sebelumnya, Namun Kalurahan Lumbungrejo juga memiliki masalah strategi yang saat ini masih menjadi kendala dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun masalah tersebut meliputi:

- a. Masih rendahnya pendapatan petani dan produktifitas pertanian. Kalurahan Lumbungrejo termasuk daerah agraris, tetapi pengembangan di sektor pertanian dan perkebunan masih belum maksimal. Bahkan, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani/perkebunan di Kalurahan Lumbungrejo relative minim. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemberdayaan bagi petani, harga hasil produktif yang relative masih rendah dan akhir-akhir ini harga pupuk semakin melejit dan susah didapat oleh para petani sehingga untuk hasil pertanian menjadi semakin tidak optimal.
- b. Masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan serta Kesehatan. Aksesibilitas di bidang Pendidikan secara umum sudah cukup memadai, akan tetapi masih ada angka putus sekolah di wilayah Kalurahan Lumbungrejo. Sedangkan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan secara umum dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan yang signifikan, tetapi Kalurahan Lumbungrejo masih minim tenaga kesehatan.

- c. Belum memadainya pembangunan infrastruktur. Keberadaan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan di Kalurahan, sehingga akses informasi dan komunikasi serta distribusi barang dan jasa dapat dirasakan secara merata. Sayangnya kondisi jalan di Kalurahan Lumbungrejo pada saat ini masih belum sepenuhnya baik, karena masih terdapat beberapa jalan di Padukuhan yang masih rusak. Selain itu, perbaikan jalan belum juga diimbangi dengan peningkatan kualitas dan sistem pemeliharaan yang optimal.
- d. Masih rendahnya perhatian dan pembinaan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berbagai usaha kecil dan menengah di masyarakat belum mendapat perhatian dan pembinaan sepenuhnya dari pemerintah Kalurahan, termasuk masih minimnya bantuan pendanaan dalam meningkatkan produksi. Alhasil, UMKM di Kalurahan Lumbungrejo hingga saat ini belum terlembagakan secara optimal, sehingga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja juga masih relatif minim.
- e. Masih minimnya kontribusi Pendapatan Asli Kalurahan. Sumbangan Pendapatan Asli Kalurahan terutama dari Pendapatan Badan Usaha Milik Kalurahan sama sekali masih rendah. Oleh karena itu optimalisasi Badan Usaha Milik Kalurahan perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan Kalurahan.

E. Pemerintahan dan Lembaga Kemasyarakatan

1. Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo

a. Visi Misi

Visi:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan Lumbungrejo yang Transformatif dan Bermartabat guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Misi:

Adapun Misi dari Kalurahan Lumbungrejo yaitu:

- 1) Meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan Kalurahan yang komunikatif, aspiratif dan partisipatif dengan mengedepankan konsep transparansi dan akuntabel;
- 2) Meningkatkan pembangunan dalam bidang infrastruktur, sumber daya manusia dan digital dengan konsep pembangunan yang berkeadilan;
- 3) Meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan.

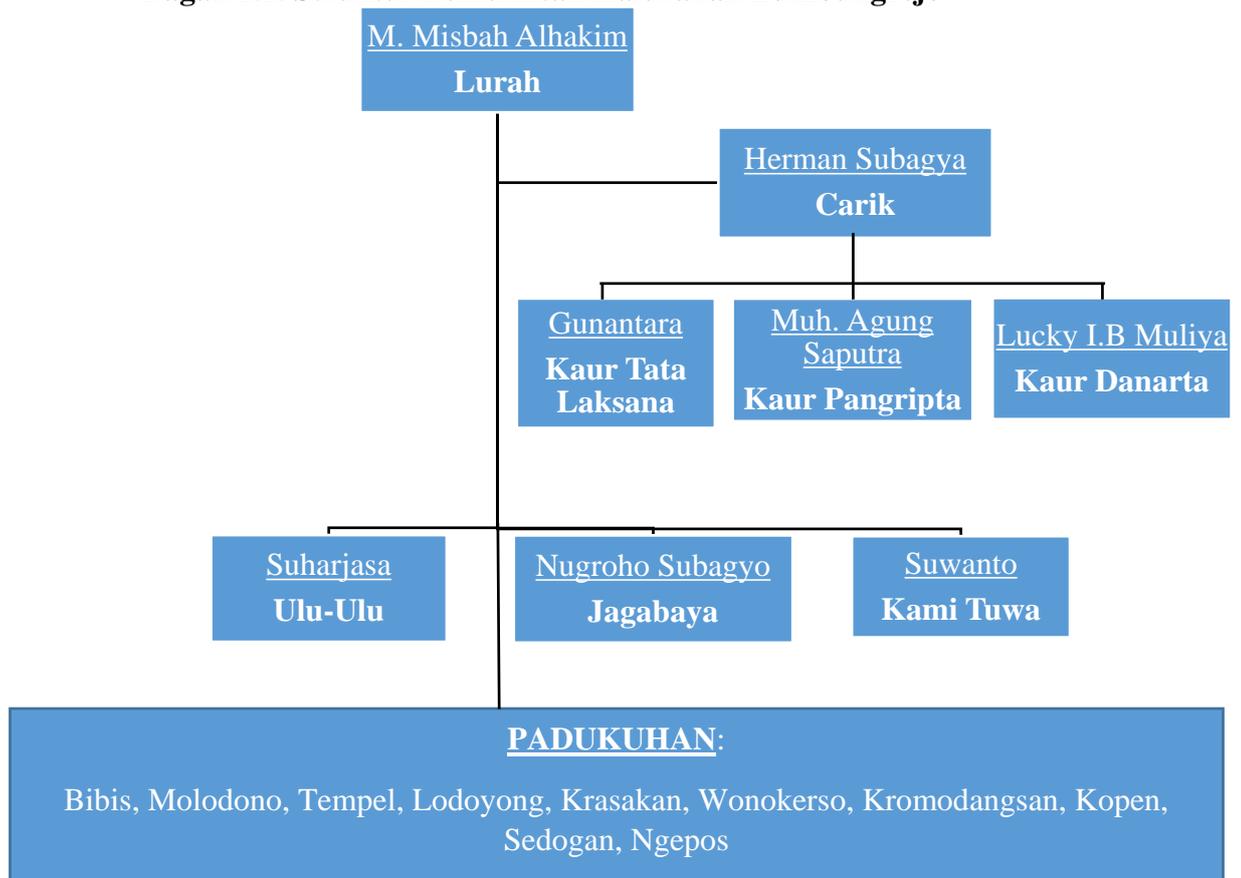
Jika dilihat dari pemaparan Visi dan Misi Kalurahan Lumbungrejo di atas, maka dapat peneliti simpulkan beberapa hal: 1) Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo mengutamakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bertanggung jawab dan senantiasa berorientasi pada perubahan yang lebih baik; 2) Pemerintah Kalurahan setempat juga berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat; 3) Kalurahan Lumbungrejo juga mendorong adanya pola komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kalurahan, Badan Pemberdayaan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat, dan Stakeholder lainnya guna terciptanya proses kerja sama yang baik serta bersifat

partisipatif dan aspiratif; 4) Meningkatkan pembangunan infastruktur, sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem digital yang dilakukan secara terencana, terukur, berkelanjutan dan berkeadilan guna memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek; dan 5) meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penguatan UMKM, serta meningkatkan perekonomian Kalurahan melalui optimalisasi lima pilar sumber pendapatan Kalurahan.

b. Struktur Pemerintah Kalurahan

Struktur pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dapt dilihat pada bagan di bawah ini:

Bagan 2.1. Struktur Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo



(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Tabel 2.6. Profil Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	M. Hisbah Alhakim	48	SLTA	Lurah (Kepala Desa)
2.	Herman Subagya	46	SLTA	Carik (Sekretaris Desa)
3.	Gunantara	46	SLTA	Kaur Tata Laksana (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)
4.	Muh. Agung Saputra	49	S1	Kaur Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan)
5.	Lucky I.B Muliya	32	S1	Kaur Danarta (Kepala Urusan Keuangan)
6.	Suharjasa	61	S1	Ulu-Ulu (Seksi Kesejahteraan)
7.	Nugroho Subagyo	54	S1	Jagabaya (Seksi Pemerintahan)
8.	Suwanto	41	SLTA	Kami Tuwa (Seksi Pelayanan)

(Sumber: Data Diolah 2024)

Jika dilihat dari profil singkat pemerintah Kalurahan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa secara SDM pemerintah Kalurahan Lumbungrejo karena secara tingkat pendidikan seimbang, dimana yang lulusan SLTA sebanyak 4 orang dan S1 juga 4 orang. Sehingga kolaborasi diantaranya dapat membantu proses penyelenggaraan pemerintahan dengan baik.

Namun sayangnya, secara jenis kelamin semuanya adalah laki-laki, yang berarti bahwa masih minimnya partisipasi kaum perempuan dalam struktur pemerintah Desa. Menurut peneliti, UU Desa saat ini sejatinya telah mendorong Desa untuk menerapkan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan masyarakat Desa, dan seharusnya hal ini dimulai dari struktur pemerintah Desa agar dapat memberikan contoh bagi masyarakat setempat. Sebab, selain UU Desa, salah satu goal dari SDGs Desa juga yaitu tentang kesetaraan gender.

Di samping itu, partisipasi kaum muda dalam struktur pemerintah Desa juga masih minim, dimana pada tabel 2.6 di atas menunjukkan bahwa hanya satu orang saja pemerintah Kalurahan Lumbungrejo yang berusia dibawah 40 tahun

dan sisanya adalah 40 tahun ke atas. Menurut peneliti, pemuda-pemudi adalah aset masa depan bagi Desa, pemuda/pemudi juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan Desa.

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Daftar pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal)

Lumbungrejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7. Pengurus Badan Permusyawaratan Kalurahan Lumbungrejo

No.	Nama	Jabatan
1.	Sutardi	Ketua
2.	H. Muhajir	Wakil Ketua
3.	Ir. Windiati Astuti	Sekretaris
4.	Darmawan	Ketua Bidang 1
5.	H. Nurkolis	Anggota Bidang 1
6.	Farid Fardiyanto, S. Psi	Ketua Bidang 2
7.	Sumardi	Anggota Bidang 2

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Jika dilihat berdasarkan komposisi struktur organisasinya, maka Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Lumbungrejo sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Karena jumlah keanggotaannya ganjil yaitu 7 (tujuh) orang dan juga terdapat keterwakilan 1 (satu) orang perempuan. Selain itu, berdasarkan temuan peneliti, menunjukkan bahwa keanggotaan Bamuskal Lumbungrejo juga berasal dari Padukuhan yang berbeda-beda. Sehingga hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 58 dalam UU Desa yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, partisipasi perempuan dan kemampuan keuangan Desa.

3. Badan Usaha Milik Kalurahan

Daftar pengurus Badan Usaha Kalurahan (BUMKal) Lumbungrejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8. Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan

No.	Nama	Jabatan
1.	Suswadi	Direktur
2.	FX Eko Yuni Prasetyo	Sekretaris
3.	Hari Widodo	Bendahara
4.	Handayatman	Manajer Operasional

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Kalurahan Lumbungrejo memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang disebut sebagai BUMKal “Lambung Sejahtera”. Kemudian jika dilihat berdasarkan tabel di atas, juga menunjukkan bahwa BUMKal tersebut telah terlembagakan dengan dilengkapi pengurus yang mencakup Direktur, Sekretaris, Bendahara, dan Manajer Operasional. Saat ini BUMKal Lumbung Sejahtera telah membuka unit usaha Pertashop yang berkerjasama dengan Bag. Perekonomian Pemda Sleman dan PT Pertamina. Menurut peneliti, pemerintah Kalurahan Lumbungrejo harus terus mendorong penguatan kelembagaan BUMKal, mengoptimalkan pengelolaan unit usaha dan manajemen programnya agar terus maju dan dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) dan kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Daftar pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Lumbungrejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9. Daftar Pengurus LPMK Lumbungrejo

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	M. Misbah Al Hakim	Penanggung Jawab (LURAH)	Lodoyong
2.	Herman Subagya	Pembina 1	Molodono
3.	Suharjasa	Pembina 2	Kopen
4.	Sutardi	Pembina 3	Sedogan
5.	H. Sunarta	Ketua I	Lodoyong
6.	Ahmad Bisron Irfan	Ketua II	Krasakan
7.	Drs. Juwarno	Sekretaris I	Sedogan
8.	FX. Eko Yuni P	Sekretaris II	Lodoyong
9.	Sujatmiko	Bendahara I	Bibis
10.	Drs. Suryono	Bendahara II	Kromodangsan
11.	Sarjiman	Ketua Pokja Ekonomi	Wonokerso
12.	Ahmad T. Nurbani	Pertanian	Wonokerso
13.	Ria Bahana	Pertanian	Bibis
14.	Agus Nurhanan	Perikanan	Krasakan
15.	Hari Widodo	Peternakan	Sedogan
16.	Sigit Kurniawan	Ketua Pokja Pembangunan	Ngepos
17.	H. Muslih	Pembangunan	Lodoyong
18.	H. Haryanto	Ketua Pokja Kemasyarakatan	Tempel
19.	Wahyu Legowo	Pemuda	Ngepos
20.	Rahmat Jatmiko	Olah Raga	Molodono
21.	Abukhori	Kesehatan	Tempel
22.	Haryoto	Kesehatan	Kopen
23.	Drs. Muhdi	Pendidikan	Kromodangsan
24.	Misbah	Pendidikan	Kopen
25.	Sulistyo	Budaya	Sedogan
26.	Sadiyono	Budaya	Kopen
27.	Siswanto	Budaya	Sedogan
28.	Ust. Abdul Wakhid	Agama	Lodoyong
29.	Rohmadi	Agama	Sedogan
30.	St. Hari Widiatmo	Agama	Tempel
31.	Eko Yuniarto	Lingkungan	Kromodangsan
32.	Joko Sulistyo	Kamtibmas	Ngepos
33.	Yasin	Kantibmas	Bibis
34.	H. Sugeng	Humas	Lodoyong
35.	Muh Mujono	Humas	Wonokerso
36.	Aris Setiyono	Humas	Panggung

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), maka sangat membantu pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dalam menyukseskan setiap program dan kegiatan pembangunan di Kalurahan setempat. Sebab, dalam kepengurusan LPMK juga telah dilengkapi penanggung jawab di setiap bidang kegiatan.

Dimana bidang-bidang tersebut di atas memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga dengan adanya penguatan peran LPMK, maka masyarakat akan terus mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

5. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Daftar Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Kalurahan Lumbungrejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.10. Daftar Tim Penggerak PKK Kalurahan Lumbungrejo

Jabatan	Nama
Penyantun	M. Misbah Alhakim (Lurah)
Ketua I	Sulastri
Ketua II	Rita Hijaiyah
Ketua III	Erna Yuniati
Sekretaris I	Aisyah Putri Wulansari
Sekretaris II	Ninik Suratminah
Sekretaris III	Titin Retno Palupi
Bendahara I	Zulfa Ratnaningsih
Bendahara II	Retno Haryatiningsih
Bendahara III	Muraeni
POKJA I: Bidang Pembinaan Karakter Keluarga	
Ketua	Suceri
Sekretaris	Suryani
Anggota	Nurul Fasihah; Suratinem; Suharti; dan Farida.
POKJA II: Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga	
Ketua	Dewi Sulastri
Sekretaris	Nur Rahayu
Anggota	Zamzami Ulwiyati Darajat; Sumiyati; Suhartinah; dan Ani Kuryati.
POKJA III: Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga	
Ketua	Nur Idawati
Sekretaris	Kriswanti
Anggota	Windiati Astuti; Fitri Rahmawati; Siti Aminasih; dan Ari Wuryati.
POKJA IV: Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan	
Ketua	Amini

Jabatan	Nama
Sekretaris	Sumartinah
Anggota	Heni Widiastuti; Siti Khasanah; Susilowati; dan Siti Rahmawati.

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) telah terbagi dalam empat Kelompok Kerja (Pokja) yaitu meliputi: Pokja Bidang Pembinaan Karakter Keluarga, Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Penguatan Ketahanan Keluarga, Kesehatan Keluarga dan Lingkungan. Dari data di atas, menunjukkan bahwa banyak masyarakat Lumbungrejo—khususnya kaum perempuan—yang turut andil dalam program ini. Artinya, dengan banyaknya tim penggerak PKK tersebut, maka PKK kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat, melalui berbagai program dan kegiatannya guna mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebab, dengan adanya organisasi ini, masyarakat juga dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan mencari solusi bersama atas setiap masalah yang dihadapi.

6. Karang Taruna

Daftar pengurus Karang Taruna Kalurahan Lumbungrejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11. Daftar Pengurus Karang Taruna Lumbungrejo

Jabatan	Nama
Pelindung	Lurah Lumbungrejo
Penasihat	Kamituwa Lumbungrejo
Pembina 1	Karang Taruna Kapanewon Tempel
Pembina 2	Majelis Pertimbangan Karang Taruna Lumbungrejo
Ketua	Tri Yuli Prihandono
Wakil Ketua 1	Akhid Rahmawan, S.Pd
Wakil Ketua 2	Este Mei Pangestu, S.Pd
Sekretaris	Aisyah Putri Wulansari, S.E

Jabatan	Nama
Wakil Sekretaris	Lina Widyaningsih
Bendahara	Ridwan Nugroho, A.Md
Wakil Bendahara	M. Agus F. Setiaji, S.Pd
Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Organisasi	
Kordinator	Fajar Nur Ikhsan, S.Pd
Anggota	Farid Fardiyanto, S.Psi; Lutfika R. Hanafih; dan Fitria Nur Hanifah.
Seksi Pengembangan Kesejahteraan Sosial	
Kordinator	Evita Dwi Nastiti, S.Kep., Ners
Anggota	Dela Ratnasari; M. Musolikhum; Adie P.J Sampurno; dan Hafizhah A. Azzahro.
Seksi Kelompok Usaha Bersama	
Kordinator	Taufiq Nur Afirudin
Anggota	Arya Hatmaka; Ella Rahman; Donny Ramadhan; dan Risma W. Nisa.
Seksi Pengembangan Kerohanian dan Pembinaan Mental	
Kordinator	Siti Amalia
Anggota	Febi Dian; M. Irfan Fauzi; dan Anas Awi.
Seksi Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya	
Kordinator	Fauzan Nur Ikwon, S.Pd
Anggota	Aldi Romadhon; Alfina Damayanti; Didin Cahyono; dan Maulina M. Ramdani.
Seksi Lingkungan Hidup dan Kepariwisatawan	
Kordinator	Ade Cika Larasati, S.Par
Anggota	Andika Nur Arifin; Dwika Rahmad; Naufal Prasetya; dan Dini Agasta Rini
Seksi Humas dan Kemitraan	
Kordinator	Dani Wibowo
Anggota	Achmad Ridwan; Aida Indriyani; M. Fahrul Sukron; dan Siti Fitria Riasati.

(Sumber: Profil Kalurahan Lumbungrejo Tahun 2023)

Dari daftar kepengurusan Karang Taruna di atas, dapat dilihat bahwa begitu banyak pemuda/pemudi yang terlibat di dalamnya. Artinya, melalui organisasi ini kaum muda juga dapat berkarya dan berkontribusi untuk kalurahan setempat. Menurut peneliti, karena di dalam Karang Taruna kebanyakan adalah pemuda/pemudi, maka mereka dapat mengembangkan berbagai inovasi dan kreatifitas guna meningkatkan kemajuan Kalurahan. Selain itu, peneliti berpandangan bahwa Seksi-Seksi yang ada di dalam Karang Taruna ini juga sangat bersentuhan langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat di

Kalurahan/Desa. Sehingga semuanya dapat difungsikan secara maksimal guna mempercepat kemajuan Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

7. Kelompok UMKM

Daftar pengurus UMKM Kalurahan Lumbungrejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12. Daftar Pengurus UMKM

No.	Nama	Jabatan
1.	Lintang	Ketua
2.	Nurhayati	Ketua II
3.	Trisulaika	Sekretaris
4.	Siwilestari	Bendahara
5.	Setiono	Humas
6.	Jumlah Anggota	43 orang

(Sumber: Data Dioalah 2024)

Kemudian berkaitan dengan daftar usaha anggota kelompok UMKM Kalurahan Lumbungrejo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13. Daftar Usaha Anggota Kelompok UMKM

No.	Jenis Usaha	Nama Pemilik	Gender (L/P)
1.	Keripik dan Peyek	Lintang	L
2.	Katering Leenok Food	Nurhayati	P
3.	Kerupuk	Trisulaika	P
4.	Kue Basah	Siwi Lestari	P
5.	Pengolahan Susu Segar dan Krim	Setiono	P
6.	Roti dan Kue	Suswadi	L
7.	Es Krim	Edi Kurnadi	L
8.	Kerupuk dan Keripik	Juminten	P
9.	Tempe Kedelai	Kuwadi	L
10.	Jajanan Pasar	Lin Kotimah Iffah	P
11.	Kuliner	Dwi Sulastri	P
12.	Kue basah dan Kering	Maryati	P
13.	Konveksi	Handayatman	L
14.	Jajanan Pasar	Rita Hijaiyah	P
15.	Martabak	Nuryasi	P
16.	Keripik dan Kerupuk	Taufik Nur	L
17.	Aneka Snack	Sutarsih	P
18.	Aneka Minuman	Titin Retno	P
19.	Keripik	Febi Dian	P

No.	Jenis Usaha	Nama Pemilik	Gender (L/P)
20.	Tempe Kedelei	Fauzan Nur	L
21.	Konveksi	Fajar Ikhsan	L
22.	Kerupuk	Nurul Faisah	P
23.	Warung Makan	Sumardi	L
24.	Kuliner	Sumi Rahayu	P
25.	Lesehan	Titik Maryanti	P
26.	Jajanan Pasar	Supinah	P
27.	Roti	Sadiyono	L
28.	Aneka Kue	Wartinah	P
29.	Aneka Snack	Wulan	P
30.	Barang Bangunan Dari Kayu	Thukul Hadi	L
31.	Sembako	Heni Purwanti	P
32.	Warkop	Kriswanti	P
33.	Lesehan	Rahmat Jatmiko	L
34.	Kuliner	Rosidah	P
35.	Kerajinan	Wayem Lestari	P
36.	Cilok	Eko Yuniarto	L
37.	Aneka Buah	Sunardi	L
38.	Martabak	Risca Anum	P
39.	Bengkel Motor	Tri Nurhantoro	L
40.	Bengkel Motor	Surawan	L
41.	Jajanan Pasar	Tutik Harjanti	P
42.	Warung Makan	Sri Sudiartanti	P
43.	Kerajinan	Ridho Pramukti	L

(Sumber: Kelompok UMKM Lumbungrejo 2023)

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan perekonomian, tidak saja hanya di tingkat Desa, bahkan untuk perekonomian nasional. Berdasarkan data pada tabel di atas bahwa Kalurahan Lumbungrejo memiliki jumlah anggota kelompok UMKM sebanyak 43 orang, maka menurut peneliti hal ini merupakan potensi yang sangat baik. Dari data di atas juga menunjukkan bahwa jenis usaha yang dikembangkan oleh para anggota UMKM juga bervariasi yaitu seperti keripik, kerupuk, jajanan pasar, aneka kue, aneka snack, katering, kuliner, warung makan, lesehan, martabak, konveksi, cilok, aneka minuman dan buah, warkop, sembako, bengkel motor, dan lain sebagainya. Menurut peneliti, jenis-jenis usaha para anggota UMKM tersebut,

membuktikan bahwa Kalurahan Lumbungrejo memiliki potensi untuk mengembangkan usaha masyarakatnya.

Namun masalahnya bahwa belum semua pelaku usaha di Kalurahan Lumbungrejo terdata sebagai anggota UMKM. Sehingga masih banyak pula usaha-usaha lainnya yang dilakukan oleh masyarakat setempat tetapi belum terdata. Oleh karenanya, ini semua kembali lagi pada kebijaksanaan pemerintah Kalurahan itu sendiri dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi UMKM tersebut. Menurut peneliti, jika Kalurahan Lumbungrejo mampu memberdayakan UMKM, dan pada gilirannya UMKM tersebut tumbuh lebih baik maka tentu akan memberikan dampak ekonomis bagi Kalurahan dan masyarakat setempat. Karena sebab itulah, peneliti kemudian menaruh perhatian terhadap proses pemberdayaan UMKM di kalurahan Lumbungrejo.

BAB III

**STRATEGI PEMERINTAH KALURAHAN LUMBUNGREJO DALAM
PENGEMBANGAN UMKM**

A. Strategi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM

1. Strategi Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan pada prinsipnya memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Kalurahan/Desa dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh Desa itu sendiri. Salah satu kewenangan pemerintah Kalurahan yang menjadi perhatian peneliti pada konteks ini yaitu berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam hal ini, pemberdayaan yang dimaksud yaitu pemberdayaan terhadap kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kalurahan Lumbungrejo, kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan perekonomian, tidak hanya di tingkat Desa, bahkan untuk perekonomian nasional. Berdasarkan temuan lapangan peneliti, Kalurahan Lumbungrejo memiliki kelompok UMKM dengan jumlah anggota sebanyak 43 orang. Menurut peneliti hal ini merupakan potensi yang sangat baik untuk dikembangkan lebih lanjut guna meningkatkan perekonomian Desa dan mensejahterakan masyarakat setempat. Namun ini semua kembali lagi pada kebijaksanaan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan itu sendiri dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi UMKM tersebut.

Berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan sebagai upaya dalam mengembangkan UMKM setempat, hal ini disampaikan oleh M. Hisbah Alkahim selaku Lurah (kepala Desa) Lumbungrejo menyampaikan bahwa:

“Untuk strategi yang Pemkal lakukan saat ini yaitu ada rencana untuk pembangunan *Rest Area*. Jadi ada lapangan Desa yang kedepannya akan kita manfaatkan untuk pembukaan lapak jualan bagi kelompok UMKM”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Strategi lainnya juga disampaikan oleh Herman Subagya selaku Carik (Sekretaris Desa) Kalurahan Lumbungrejo, yakni:

“Jadi selain *Rest Area* itu, strategi pengembangan UMKM yang pemerintah Kalurahan upayakan juga yaitu membuka akses kerja sama dengan organisasi dan lembaga atau Dinas-Dinas terkait di DIY untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha yang ada di Lumbungrejo. Lalu saat ini Pemkal juga sedang mengembangkan program Desa *Preneur* dengan harapan agar kedepannya kelompok UMKM bisa menciptakan produk unggulan Desa. Selain itu Pemkal juga sering memfasilitasi pelaku usaha untuk membuka lapak jualan ketika ada event-event di Kalurahan Lumbungrejo”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Dari pemaparan kedua narasumber di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dalam pengembangan UMKM yaitu meliputi: 1) rencana pembangunan *Rest Area*; 2) Berkerja Sama Dengan Pihak Eksternal; 3) Pengembangan Konsep Desa *Preneur*; dan 4) Penyelenggaraan *Event*. Adapun analisis peneliti terhadap pelaksanaan strategi-strategi tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, Rencana Pembangunan *Rest Area*. Pada prinsipnya, rencana pembangunan *rest area* tersebut yaitu bertujuan untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar memiliki titik sentral penjualan. Disamping itu, karena *rest area* tersebut dicanangkan akan dibangun di lapangan Desa, maka ini juga sangat

strategis karena lapangan tersebut merupakan tempat yang sering digunakan ketika ada kegiatan atau *event* yang bersifat massal di Kalurahan Lumbungrejo.

Lebih lanjut, menurut peneliti, dengan adanya pembangunan rest area tersebut maka pelaku usaha di Kalurahan Lumbungrejo dapat memanfaatkan tempat tersebut untuk membuka lapak atau stand jualannya. Peneliti beranggapan bahwa hal ini strategis bukan hanya karena lapangan tersebut sering digunakan untuk penyelenggaraan *event* semata, tetapi karena lokasi lapangannya yang tepat berada di dekat kantor Kalurahan dan dititik keramaian. Sehingga ini kedepannya berpeluang untuk menjadi titik sentral perputaran ekonomi bagi masyarakat Lumbungrejo.

Berkaitan dengan rencana pembangunan rest area tersebut, hal ini kemudian diterangkan lebih lanjut oleh M. Hisbah Alkahim selaku Lurah Lumbungrejo, yakni:

“Rencana pembangunan *rest area* itu sudah mendapatkan izin pemanfaatan tanah dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) DIY, dan tinggal menunggu rekomendasi dari Panitikismo untuk mempreroleh izin dari Gubernur DIY. Lalu untuk AMDA, *Master Plan* dan *Detail Enginering Design* sudah dilakukan pada tahun 2023. Kalau proses perijinannya sudah selesai semua, maka penganggaran dan pelaksanaan pembangunannya akan direncanakan pada tahun anggaran 2025”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa rencana pembangunan *rest area* tersebut saat ini sudah mengantongi izin pemanfaatan tanah dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Provinsi DIY, dan tinggal menunggu rekomendasi dari Panitikismo (Lembaga Pertanahan Kraton) untuk mempreroleh izin dari Gubernur DIY. Sedangkan untuk Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), *Master Plan* dan *Detail Enginering Design* (DED) sudah dilakukan pada tahun 2023. Sementara untuk penganggaran dan pelaksanaan

pembangunannya akan direncanakan pada tahun anggaran 2025. Melihat tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Lumbungrejo tersebut, menurut peneliti hal ini menunjukkan bahwa adanya keseriusan dan komitmen dari pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM melalui pembangunan rest area di Kalurahan Lumbungrejo. Dengan demikian, maka pemerintah kalurahan telah berupaya untuk memfasilitasi kepentingan pelaku usaha di Lumbungrejo, yang selama ini mengalami kesulitan lahan usaha dan tidak memiliki titik sentral.

Kemudian, rencana pembangunan rest area ini juga sudah disosialisasikan kepada kelompok UMKM setempat, hal ini disampaikan oleh Nurhayati selaku ketua kelompok UMKM Lumbungrejo bahwa:

“Mengenai rencana pembangunan rest area itu kami (kelompok UMKM) sudah disampaikan oleh pak Carik saat pertemuan dengan kelompok UMKM saat itu. Beliau juga meminta masukan dari pelaku usaha tentang rencana tersebut, dan Alhamdulillah masukan dari kami diterima oleh Pemkal dan kami sebagai pelaku usaha mengapresiasi rencana itu karena kedepannya akan sangat membantu kemajuan UMKM di Lumbungrejo”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan pembangunan rest area tersebut juga sudah melibatkan partisipasi masyarakat, dimana aspirasi masyarakat telah diakomodir oleh pemerintah Kalurahan dan pelaku usaha pun sangat berantusias untuk rencana tersebut. Menurut peneliti, hal ini berarti bahwa rencana pembangunan rest area ini tidak terlepas dari upaya pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dalam menjawab kebutuhan dan kepentingan pelaku usaha setempat. Sehingga dengan adanya rest area tersebut maka kedepannya usaha-usaha masyarakat dapat berkembang dan mampu memberikan dampak ekonomis untuk masyarakat Desa Lumbungrejo pada umumnya.

Kedua, Kerja Sama Dengan Pihak Eksternal. Berdasarkan temuan peneliti, salah satu strategi yang juga dilakukan oleh pemerintah Kalurahan yaitu berkerja sama dengan organisasi-organisasi pemberdayaan masyarakat dan dengan lembaga atau dinas terkait. Dalam hal ini, beberapa kampus dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga turut membantu pelaku usaha dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan guna pengembangan UMKM masyarakat setempat. Selain itu, pemerintah Kalurahan juga menjembatani kelompok UMKM dengan lembaga atau dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) DIY, Dinas Pariwisata dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kabupaten Sleman. Dimana pada konteks ini Diskop DIY dan Dinas Pariwisata Sleman juga turut membantu pelaku UMKM dalam bentuk pelatihan, pendampingan dan pada beberapa kesempatan juga memberikan bantuan fasilitas dan modal usaha untuk Kelompok UMKM Lumbungrejo. Sedangkan kerja sama dengan pihak BRI lebih pada upaya untuk memudahkan masyarakat setempat dalam memperoleh peminjaman modal usaha melalui Kredit Usaha Mikro (KUR).

Berkaitan dengan strategi melalui kerjasama dengan pihak eksternal tersebut, alhasil banyak pihak juga yang turut terlibat untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kalurahan Lumbungrejo, termasuk kepada kelompok UMKM itu sendiri. Hal ini sejalan dengan yang dipaparkan oleh Lin Kotomah Iffah sebagai pelaku UMKM, bahwa:

“Sejauh ini memang banyak pihak yang melakukan program pemberdayaan terhadap kami sebagai pelaku usaha baik itu dari mahasiswa dan LSM. Selain itu, ada juga program pemberdayaan dari dinas pemerintah terkait, termasuk dari pihak BRI untuk peminjaman KUR”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Dengan demikian, peneliti berpandangan bahwa proses kerja sama dengan pihak eksternal ini, merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dalam memfasilitasi pelaku usaha guna pengembangan UMKM masyarakat setempat. Menurut peneliti, kerja sama tersebut perlu dilakukan secara berkesenambungan sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya datang untuk memberikan pelatihan dan bantuan semata, tetapi juga melakukan pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat benar-benar mandiri dan dapat mengembangkan kemampuannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Namun dalam perkembangannya, temuan peneliti menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan sering kandas ditengah jalan. Hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang berkerja sama masih bersifat musiman sehingga tidak adanya proses pendampingan yang berkelanjutan. Misalnya, pihak kampus yang melakukan program pemberdayaan hanya pada saat mahasiswanya melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) semata dan ketika masa KKN tersebut berakhir, maka berakhir pula pemberdayaan yang dilakukan tanpa adanya proses pendampingan lebih lanjut. Begitu juga dengan pihak LSM yang sekedar melakukan kegiatan pemberdayaan hanya pada momentum tertentu, yang hanya sekedar merealisasikan program kerja dan memenuhi kebutuhan riset mereka. Sedangkan dari pihak dinas terkait, juga melakukan kegiatan pemberdayaan hanya sebatas menjalankan kebijakan pemerintah Daerah terkait yang kemudian diturunkan melalui program-program kedinasan, yang terkadang mengabaikan pentingnya pendampingan secara berkelanjutan.

Menurut peneliti, hal ini perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah Kalurahan Lumbungrejo ketika menjalin kerja sama dengan pihak

eksternal agar terlebih dahulu membangun komitmen pemberdayaan yang secara bertahap dan berkelanjutan. Karena jika tidak adanya komitmen yang demikian, maka program pemberdayaan yang dilakukan hanya sebatas menjadikan masyarakat sebagai obyek pelaksanaan program semata, tanpa adanya upaya yang menghantarkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam menentukan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan masa depannya.

Ketiga, Pengembangan Konsep Desa Preneur. Konsep ini pada prinsipnya mendorong kemampuan Desa dalam menumbuh-kembangkan unit-unit usaha skala Desa melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha masyarakat, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa pada umumnya.

Dalam dinamikanya di Kalurahan Lumbungrejo, temuan peneliti menunjukkan bahwa proses pengembangan konsep Desa Preneur tersebut pada saat ini bisa dikatakan masih berjalan stagnan. Meskipun tujuan dari Desa Preneur ini sangat baik karena berupaya untuk menciptakan produk-produk unggulan Kalurahan, namun dalam prakteknya hingga saat ini masih belum terlaksana secara maksimal. Sejalan dengan ini, Dwi Sulastri selaku anggota UMKM Lumbungrejo juga menyampaikan hal serupa bahwa:

“Untuk Desa Preneur sendiri sejauh ini perkembangannya boleh dibilang masih pada tahap perencanaan, karena baru juga membentuk pengurusnya pada akhir tahun 2023 lalu. Sebenarnya saat ini ada upaya untuk mengembangkan produk lokal melalui program Desa Preneur itu. Cuman masih banyak kendala seperti kurangnya permodalan, peran Pemkal dan BUMKal juga kesannya minim dan belum fokus untuk mengembangkan Desa Preneur itu sendiri karena mungkin masih mengurus program pembangunan yang lainnya”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Dari pemaparan narasumber di atas, kembali menegaskan bahwasanya program Desa Preneur tersebut belum berjalan secara maksimal, sehingga saat ini belum mampu menghasilkan produk unggulan Desa yang dikelola secara bersama oleh kelompok UMKM yang ada. Dalam temuan peneliti, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 1) karena Kalurahan Lumbungrejo baru saja mengadopsi konsep Desa Prenur pada pertengahan tahun 2023 dan membentuk pengurusnya pada akhir tahun 2023, sehingga perkembangannya saat ini baru pada tahap perencanaan dan pengorganisasian program; 2) minimnya permodalan untuk pengembangan produk lokal; dan 3) masih kurangnya sinergitas antara pengurus Desa Preneur, pemerintah Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), dan kelompok UMKM yang ada di Lumbungrejo.

Alhasil, dengan segala keterbatasan yang dihadapi, saat ini pengurus Desa Preneur hanya dapat memainkan peranan dalam melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM, tetapi belum mampu mendorong kelompok UMKM yang ada di setiap Padukuhan untuk menghasilkan produk unggulannya yang dikelola secara bersama. Sehingga usaha-usaha masyarakat hingga saat ini masih berjalan sendiri-sendiri dan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, menurut peneliti, proses pemberdayaan kelompok UMKM melalui strategi pengembangan konsep Desa Preneur nampaknya masih jauh dari konsep pemberdayaan yang sesungguhnya. Sebab, konsep pemberdayaan terhadap masyarakat tidak hanya sebatas pelaksanaan pelatihan-pelatihan dan pendampingan semata; tetapi yang paling penting adalah bagaimana menghasilkan output yang membuat masyarakat lebih produktif dari

sebelumnya dan memiliki kemandirian tindakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Oleh karenanya, menurut peneliti, upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan Desa Preneur adalah perlunya penguatan kelembagaan Desa melalui kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah Desa, pengurus Desa Preneur, BUMKal, dan kelompok UMKM itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti berpandangan bahwa peranan dari setiap kelembagaan tersebut memiliki saling hubungan yang signifikan dalam mengembangkan konsep Desa Preneur guna memberdayakan kelompok UMKM, meningkatkan perekonomian Kalurahan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Disamping itu, karena kaitannya dengan kegiatan/program pemberdayaan yang pada prinsipnya bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan keterbatasan yang dialami oleh masyarakat, maka pemerintah Kalurahan sebagai pemrakarsa pemberdayaan masyarakat ditingkat Kalurahan perlu lebih mengoptimalkan berbagai potensi sumber daya yang ada guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam konteks pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, pemerintah Kalurahan bersama BUMKal setempat dapat memainkan peranan seperti melakukan pemetaan potensi Desa yang dapat dikembangkan oleh masyarakat melalui melalui program Desa Preneur, memperkuat kelembagaan Desa Preneur, melakukan penyertaan modal dari sebagian Dana Desa atau dari sebagian omset BUMKal kepada kelompok UMKM (bukan pada individu pelaku usaha), dan menjalin kemitraan dengan pihak eksternal guna memperoleh dukungan baik secara permodalan, bantuan fasilitas

penunjang dan penyuluhan guna pengembangan UMKM kearah yang lebih produktif.

Keempat, Penyelenggaraan *Event*. Salah satu strategi yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan yaitu dengan penyelenggaraan *event* (acara) yang bersifat massal di Kalurahan Lumbungrejo. Hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM dapat membuka lapak jualannya di lokasi *event* tersebut. Selain itu, dengan adanya event-event yang diselenggarakan di tingkat Kalurahan, maka hal tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM setempat, tetapi juga dapat menambah pendapatan Desa melalui penjualan tiket dan pendapatan masyarakat melalui jasa parkir. Sehingga hal ini secara umum dapat pula mendongkrak perputaran ekonomi Kalurahan dengan harapan bahwa orang-orang yang menghadiri event tersebut dapat membelanjakan uangnya di Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh peneliti di Lapangan, menunjukkan bahwa strategi ini cukup efektif dalam upaya pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, hanya saja penyelenggaraan event tersebut bersifat kondisional dan berdasarkan momentum tertentu, sehingga tidak dapat dilakukan setiap saatnya. Dalam temuan peneliti juga menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan event setidaknya dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui inisiatif yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan itu sendiri dan melalui kerjasama dengan pihak eksternal untuk menyelenggarakan event di Kalurahan Lumbungrejo. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh M. Hisbah Alhakim selaku Lurah Lumbungrejo, yakni:

“Kalau untuk event, itu ada yang diselenggarakan oleh Desa sendiri maupun oleh mitra Desa atau dari pihak luar yang berkerja sama dengan Kalurahan Lumbungrejo, dan ada juga yang kebetulan tidak memiliki tempat untuk event lalu mereka menyewa tempat di Kalurahan Lumbungrejo. Selama ini biasanya Lapangan Desa itulah yang sering digunakan jika ada acara-acara besar seperti kampanye politik atau konser”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Dalam wawancara lebih lanjut dengan Lurah Lumbungrejo terkait penyelenggaraan event tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa: 1) Event yang diselenggarakan atas inisiatif pemerintah Kalurahan biasanya untuk memperingati momen HUT Kalurahan dan HUT RI melalui kegiatan Kalurahan Cup (biasanya pertandingan sepak bola dan bola volly antar RT atau Padukuhan, dan lomba-lomba anak lainnya) dan acara pagelaran budaya Jawa (biasanya pertunjukan kesenian Hadroh, Sholawatan, Kethoprak, Jathilan, Mauludan, Nyadran, Selikuran, Kenduri, dll); 2) Event yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak eksternal biasanya berupa pameran, bazar, konser, kampanye partai politik, kampanye calon Legislatif maupun calon Bupati, dll dari pihak-pihak terkait; dan 3) Penyelenggaraan event-event tersebut pada umumnya dilaksanakan di lapangan Desa Lumbungrejo itu sendiri, dan oleh pemerintah Kalurahan pada konteks ini selalu memberikan ruang bagi kelompok UMKM setempat untuk membuka lapak jualannya, serta pada beberapa kesempatan oleh pembawa acara (MC) juga dimintai untuk turut mempromosikan produk-produk jualan masyarakat.

Gambar 3.1. Penyelenggaraan Event UMKM Kalurahan Lumbungrejo



(Sumber: Dokumentasi Sekunder 2024)

Berkaitan dengan strategi event tersebut dalam pengembangan UMKM, temuan peneliti menunjukkan bahwa hal tersebut juga disambut positif oleh masyarakat setempat—terutama bagi kelompok UMKM itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari tingginya antusiasme masyarakat, dimana banyak pelaku-pelaku UMKM yang membuka lapak jualannya pada saat adanya event. Berkaitan dengan antusiasme masyarakat tersebut, juga disampaikan oleh Nurhayati sebagai pelaku dan ketua UMKM, yakni:

“Ya kami sangat bersyukur dengan adanya event atau acara pagelaran di Lumbungrejo, karena disana kami diberikan ruang untuk membuka lapak jualan. Saya sendiri sebagai pelaku usaha kuliner sangat merasakan dampak dari event, jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Saat ada event besar, itu terbukti pendapatan saya meningkat, begitu juga dengan pendapatan anggota kelompok UMKM yang lainnya”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Namun sekalipun strategi *event* ini sangat berdampak positif dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, tetapi peneliti menilai bahwa masih terdapat beberapa kendala, yaitu berkaitan dengan masih minimnya fasilitas lapangan seperti penerangan yang belum memadai, belum tersedianya ruang

khusus untuk lapak UMKM sehingga ketika mereka membuka lapak jualan masih terlihat berantakan, dan belum tersedianya podium permanen sebagai panggung yang digunakan ketika ada *event*. Menurut peneliti, beberapa kendala tersebut harapannya dapat diatasi oleh pemerintah Kalurahan melalui pembangunan *rest area*, karena rencananya akan dibangun tepat di lapangan Desa tersebut guna pengembangan UMKM lebih lanjut kedepannya.

2. Fasilitasi Kelompok UMKM oleh Pemerintah Kalurahan

Fasilitasi yang dimaksudkan dalam konteks ini yaitu berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dan pelaku UMKM untuk mempermudah dan memperlancar proses pada kegiatan kewirausahaan di Kalurahan Lumbungrejo. Adapun bentuk fasilitasi yang dilakukan salah satunya adalah pembentukan kelompok UMKM. Hal ini disampaikan oleh Handayatman selaku pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Lumbungrejo, yakni:

“Dalam pengembangan UMKM ini, BUMKal sebagai badan usaha Kalurahan juga turut terlibat di dalamnya. Jadi kontribusi BUMKal dalam pengembangan UMKM itu diantaranya melakukan pembentukan Kelompok UMKM, pembentukan pengurus kelompok UMKM, melakukan pelatihan dan pendampingan, dan juga pemberian modal kepada kelompok UMKM”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Bentuk fasilitasi lainnya dalam pengembangan UMKM juga disampaikan oleh Herman Subagyo selaku Carik Kalurahan Lumbungrejo, bahwa:

“Untuk mendukung kemajuan UMKM, dari pihak Kalurahan juga pernah memfasilitasi tenda kerucut, meja untuk jualan, dan rombongan/lapak jualan kepada pelaku-pelaku usaha yang sudah tergabung di dalam kelompok UMKM. Selebihnya kita turut memonitoring kelompok UMKM, dan ketika ada kendala yang dihadapi kami juga membantu untuk carikan solusinya”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Dari pemaparan kedua narasumber di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa fasilitasi yang dilakukan dalam mendukung proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo yaitu antara lain: 1) Pembentukan Kelompok dan Pengurus UMKM; 2) Pemberian Fasilitas Penunjang; 3) Permodalan; dan 4) Pelatihan dan Pendampingan. Bentuk-bentuk fasilitasi tersebut akan peneliti uraikan lebih lanjut di bawah ini.

Pertama, Pembentukan Kelompok dan Pengurus UMKM. Berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, pembentukan kelompok dan pengurus UMKM sudah dilakukan semenjak tahun 2021. Pembentukan tersebut boleh dikatakan terlambat, namun setidaknya semenjak tahun 2021, melalui pembentukan tersebut telah menunjukkan adanya perhatian pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Menurut peneliti, pembentukan kelompok dan pengurus UMKM merupakan dasar utama dalam upaya pengembangan UMKM lokal karena pelaku-pelaku usaha dapat terfasilitasi melalui kelompok tersebut. Artinya, dengan adanya kelompok UMKM ini para pelaku usaha dapat berkumpul dan bertukar pikiran untuk pengembangan usahanya. Begitu juga ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok dapat didiskusikan dan dicarikan solusi bersamanya secara organisasioanl.

Dalam temuan peneliti, pembentukan kelompok UMKM bukan sepenuhnya atas inisiatif dan kesadaran pelaku usaha itu sendiri dalam upaya menjawab kebutuhannya, tetapi hal ini juga tidak terlepas dari peran dan dorongan pemerintah Kalurahan itu sendiri melalui Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) dalam memfasilitasi pembentukan kelompok dan pengurus UMKM tersebut. Adapun tujuan dalam pembentukan kelompok dan pengurus UMKM

tersebut kemudian dipaparkan oleh Handayatman selaku pengurus BUMKAL Lumbungrejo, yakni:

“Kami menyadari bahwa pemerintah Kalurahan itu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakatnya. Karena UMKM ini ada kaitannya dengan kerja-kerja BUMKAL sebagai lembaga ekonomi ditingkat Desa, akhirnya pemerintah Kalurahan memberikan mandat kepada BUMKAL untuk merangkul semua pelaku usaha yang ada melalui pembentukan kelompok UMKM, dan untuk mempermudah pola komunikasi dan koordinasinya BUMKAL juga sekaligus membentuk pengurus UMKM itu. Sehingga dengan terbentuknya kelompok dan pengurus UMKM ini bertujuan agar kedepannya dapat bergerak bersama dalam meningkatkan perekonomian Kalurahan guna kesejahteraan masyarakat Lumbungrejo”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Dari pemaparan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan dari pembentukan kelompok dan pengurus UMKM yaitu tidak terlepas dari penyelenggaraan kewenangan pemerintah Kalurahan itu sendiri di bidang pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, yang dalam praktiknya diorientasikan pada pembangunan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Tujuan lainnya adalah untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kalurahan, BUMKAL sebagai lembaga ekonomi Kalurahan dan pelaku usaha di Lumbungrejo dalam upaya pengembangan UMKM Kalurahan lebih lanjut kedepannya. Dilain sisi, dengan adanya kelompok UMKM tersebut juga dapat memudahkan pemerintah Kalurahan Lumbungrejo dalam memberdayakan pelaku-pelaku usaha yang ada agar dapat meningkatkan usahanya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Namun, menurut peneliti, pembentukan kelompok dan pengurus UMKM saja tidak serta merta mengarah pada tujuan pembangunan ekonomi Kalurahan yang dimaksudkan; jika tanpa adanya tindakan-tindakan signifikan yang

dilakukan baik dari pemerintah Kalurahan, BUMKal maupun dari kelompok UMKM itu sendiri dalam mengoptimisasi dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Kalurahan Lumbungrejo. Dalam temuan di lapangan dan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh peneliti, justru menunjukkan hal sebaliknya, dimana tindakan dan upaya-upaya bersama yang dilakukan guna pengembangan UMKM itu sendiri masih belum signifikan. Hal ini terbukti bahwa hingga saat ini kelompok UMKM belum memiliki produk yang dikelola bersama oleh anggota kelompok, justru pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya masih menjalankan usahanya masing-masing tanpa adanya usaha ekonomi kolektif yang dibangun bersama. Hal serupa juga disampaikan oleh Lin Kotimah Iffah selaku anggota UMKM bahwa:

“Sebenarnya kelompok UMKM memang sudah ada, tapi bisa dikatakan belum produktif. Bagaimana mau produktif kalau modal, fasilitas dan pendampingannya juga kurang dari pemerintah Kalurahan. Apalagi anggota-anggota kelompok juga memiliki kesibukannya masing-masing, makanya ini juga membuat kita sulit untuk berkumpul dan membicarakan rencana usaha bersama di dalam kelompok yang sifatnya lebih strategis untuk kedepannya. Palingan kita berkumpul itu ketika ada sosialisasi dari pemerintah kalurahan atau dari dinas-dinas terkait, dan ketika ada pelatihan atau pemberian bantuan saja”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Pemaparan di atas pada intinya mengafirmasi kondisi kelompok UMKM saat ini yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam rangka pengembangan UMKM yang berbasiskan pada potensi ekonomi lokal di tingkat Kalurahan. Hingga saat ini kelompok UMKM tersebut hanya sekedar difungsikan sebagai wadah pelatihan, sosialisasi dan penerimaan bantuan semata. Menurut peneliti, pemberian bantuan, pelatihan dan sosialisasi tentu saja merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya pengembangan UMKM itu sendiri. Namun jika keberadaan UMKM hanya sekedar difungsikan untuk itu, maka sama halnya

dengan memposisikan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya sebagai obyek—bukan sebagai subyek yang berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi Kalurahan. Artinya, dalam rangka pengembangan UMKM maka kelompok UMKM semestinya menjadi wadah produktif, selain untuk meningkatkan kualitas usaha masyarakat, tetapi disamping itu juga mampu menciptakan nilai lebih melalui produksi sumber daya ekonomi lokal yang dikelola secara kolektif guna memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat pada umumnya.

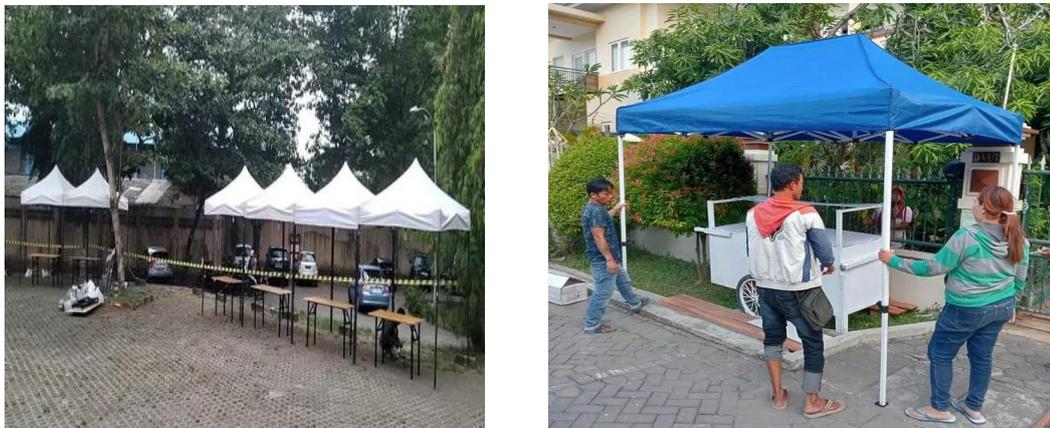
Oleh karenanya, menurut peneliti, dengan adanya kelompok UMKM tersebut semestinya menjadi instrument penting dalam pengembangan ekonomi Kalurahan secara umum, bukan hanya sarana pengembangan ekonomi para pelaku usaha secara individual yang berada di dalam kelompok tersebut. Dengan demikian, menurut peneliti perlu adanya kolaborasi dan sinergitas antara kelompok UMKM, Pemerintah Kalurahan dan BUMKal setempat dalam mengeksplorasi potensi sumber daya ekonomi lokal yang ada guna menghasilkan produk-produk unggulan Kalurahan, sehingga pada gilirannya dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas guna kesejahteraan masyarakat setempat. Disamping itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan melalui pengembangan UMKM, maka pemerintah Kalurahan dan BUMKal juga perlu melakukan tindakan yang signifikan mulai dari penyertaan modal usaha kelompok, pemberian fasilitas penunjang produksi kelompok, kerjasama dengan pihak eksternal terkait, hingga pada pendampingan yang intens dan berkelanjutan kepada kelompok UMKM.

Kedua, Pemberian Fasilitas Penunjang UMKM. Salah satu kebutuhan mendasar dalam proses pengembangan UMKM yaitu tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang di dalamnya guna meningkatkan aktivitas dan produktifitas usaha masyarakat. Dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan Lumbungrejo kepada para pelaku usaha setempat, yaitu fasilitas berupa tenda kerucut dan meja untuk jualan, serta rombongan/lapak jualan. Berkaitan dengan pemberian fasilitas kepada pelaku UMKM maupun kepada kelompok UMKM, kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Dwi Sulastri selaku anggota kelompok UMKM bahwa:

“Kalau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kalurahan itu hanya payung kerucut, meja dan rombongan saja. Itu pun tidak kepada semua anggota UMKM, karena sebagian yang sudah memiliki tempat usaha atau lapaknya sendiri tentu tidak diberikan lagi, tapi diberikan kepada para pelaku usaha yang masih jualan di pinggir jalan dan belum memiliki lapak permanen. Untuk fasilitas secara kelompok hingga saat ini belum ada mas, karena di dalam kelompok itu kegiatannya hingga saat ini masih sebatas pelatihan dan rapat saja”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diberikan kepada para pelaku UMKM masih sebatas pemberian payung kerucut, meja dan rombongan/lapak jualan. Ini juga hanya diberikan kepada para pelaku usaha yang memang belum memiliki rombongan dan payung kerucut saat melapak misalnya di pinggir jalan atau di lapangan. Sedangkan kepada pelaku usaha yang sudah memiliki rombongan atau tempat jualan yang permanen tidak diberikan lagi fasilitas. Menurut peneliti, pemberian fasilitas tersebut sudah tepat dalam hal untuk membantu para pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan dan masih mengalami kesulitan sarana prasarana pendukung dalam mengembangkan usahanya.

**Gambar 3.2. Fasilitas Payung Kerucut, Meja, Rombong/Lapak Jualan
UMKM**



(Sumber: Dokumentasi Sekunder 2024)

Namun menurut peneliti, pemerintah Kalurahan perlu memberikan fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan secara kelompok. Apalagi ketika adanya upaya untuk mengembangkan unit-unit produksi di dalam kelompok, maka tentu akan sangat membutuhkan fasilitas lainnya seperti mesin olahan, rumah olahan, dan lain sebagainya yang dapat menunjang upaya tersebut. Sebab jika di dalam kelompok saja tidak memiliki fasilitas yang memadai, maka hal ini juga akan sangat berdampak pada tingkat produktifitas kelompok itu sendiri dalam mengoptimalisasi potensi ekonomi lokal yang ada untuk menciptakan produk-produk unggulan Kalurahan.

Artinya, memberikan fasilitas terhadap para pelaku usaha secara individual memang perlu karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pengembangun UMKM, tetapi penting juga agar di dalam kelompok UMKM itu sendiri memiliki aset dan fasilitas penunjang yang dapat digunakan secara bersama dalam rangka pembangunan usaha ekonomi kolektif para anggota kelompok di dalamnya. Hal ini bertujuan agar kelompok UMKM dapat memberikan manfaat ekonomis kepada para anggota kelompok di dalamnya

maupun kepada masyarakat Kalurahan setempat pada umumnya, sehingga kelompok tidak hanya berfungsi untuk rapat dan pelatihan saja, tetapi juga untuk mengaktualisasikan kreatifitas masyarakat itu sendiri dalam mengembangkan ekonomi Kalurahan.

Ketiga, Permodalan untuk Kelompok UMKM. Dalam dunia kewirausahaan atau bisnis, tentu hal utama yang dibutuhkan adalah modal. Artinya, setiap usaha yang dilakukan akan sangat bergantung pada besaran modal yang dimiliki oleh para pelaku usaha; dimana semakin besar modalnya, maka akan semakin besar pula usaha yang dikembangkan; dan begitupun sebaliknya, apabila modalnya sedikit maka usaha yang dilakukan akan terbatas.

Berkaitan dengan permodalan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, hal ini diutarakan oleh Handayatman selaku pengurus BUMKAL Lumbungrejo, yakni:

“Kalau mengenai permodalan, pemerintah Kalurahan saat ini belum bisa memfasilitasi. Jadi memang belum ada modal misalnya dari dana Desa yang diberikan baik kepada para pelaku usaha maupun kepada kelompok UMKM, karena dana yang ada masih lebih difokuskan untuk biaya pembangunan lainnya. Karena pemerintah Kalurahan belum bisa memfasilitasi modal, akhirnya BUMKAL berinisiatif untuk memberikan bantuan dana kepada kelompok UMKM untuk menambah kas mereka”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Dari pemaparan di atas, menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah Kalurahan Lumbungrejo sendiri hingga saat ini belum bisa memberikan bantuan modal baik kepada para pelaku usaha secara individu maupun kepada kelompok UMKM. Hal ini dikarenakan keuangan Kalurahan yang terbatas dan dana yang ada masih diprioritaskan untuk pembiayaan program pembangunan lainnya. Tetapi BUMKAL juga turut membantu kelompok UMKM melalui sumbangan dana untuk menambah kas kelompok. Namun berdasarkan informasi yang dihimpun

peneliti, sekalipun pemerintah Kalurahan tidak memberikan bantuan modal secara langsung, tetapi pemerintah Kalurahan juga memfasilitasi para pelaku usaha setempat agar dapat mengakses permodalan baik melalui pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Kapanewon Tempel maupun melalui koperasi. Pada konteks ini, pemerintah Kalurahan membantu untuk membuat berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam memenuhi persyaratan peminjaman KUR. Selain itu, kerja sama dengan BRI unit Tempel tersebut juga bertujuan agar pihak bank dapat mempermudah proses peminjaman yang diajukan oleh masyarakat Lumbungrejo.

Dalam temuan peneliti lebih lanjut, peran pemerintah Kalurahan dalam memfasilitasi modal bagi pelaku usaha dan kelompok UMKM juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi atau dinas terkait, yaitu seperti Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Dinas Pariwisata Sleman dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman. Dimana ketiga dinas tersebut pernah memberikan bantuan modal kepada kelompok UMKM yang ada, walaupun jumlahnya sedikit namun setidaknya turut membantu proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Berkaitan dengan pemberian modal bagi kelompok UMKM, hal ini juga dituturkan oleh Nurhayati selaku ketua kelompok UMKM bahwa:

“Untuk modal dari pemerintah Kalurahan sejauh ini belum ada, justru adanya dari BUMKal. Tetapi pemerintah Kalurahan juga selalu berupaya untuk membantu permodalan melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Sehingga ketika ada kunjungan dari Dinas Pariwisata Sleman, Dinas PMK Sleman dan Diskop UMKM DIY juga turut memodali kelompok UMKM. Tapi besarnya tidak banyak, cuman kisaran Rp. 1.000.000-3.000.000. Uang tersebut biasanya langsung dimasukkan di khas kelompok, sehingga ketika ada kegiatan kelompok seperti pelatihan maka kita gunakan uang tersebut untuk belanja kebutuhan kegiatan”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Pernyataan di atas mengafirmasi bahwa pemerintah Kalurahan hingga saat ini belum memberikan bantuan modal kepada kelompok UMKM, tetapi turut mengusahakan agar kelompok UMKM memperoleh akses modal dari stakeholder melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Adapun bantuan modal yang diperoleh dari pihak eksternal tersebut tidak diperuntukkan kepada pelaku usaha secara individual, tetapi kepada kelompok UMKM secara organisasioanl. Namun karena dana yang didapati relatif kecil, sehingga dana tersebut hanya berfungsi untuk menambah kas kelompok, yang pada gilirannya digunakan untuk membiayai kebutuhan kelompok UMKM ketika melakukan kegiatan seperti pelatihan, rapat dan lain sebagainya.

Namun sekalipun pemerintah Kalurahan tidak melakukan pernyataan modal secara langsung yang bersumber dari Dana Kalurahan terhadap kelompok UMKM, tetapi secara tidak langsung hal ini diwakili oleh BUMKal. Sebab, berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, pada beberapa kesempatan BUMKal juga turut memberikan bantuan modal bagi kelompok UMKM. Sayangnya, baik dana dari BUMKal maupun dari dinas-dinas terkait yang diberikan kepada kelompok UMKM, semua itu belum bisa dikatakan sebagai modal usaha karena besarnya masih relatif minim. Sehingga bantuan dana tersebut lebih tepatnya bersifat sumbangan untuk kas kelompok semata.

Oleh karena itu, menurut peneliti, secara permodalan dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo masih minim. Dalam hal ini, peneliti berpandangan bahwa minimnya modal yang diperoleh oleh kelompok UMKM tersebut, juga mempengaruhi minimnya tingkat produktifitas kelompok dalam mengembangkan usahanya. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah

Kalurahan memang sudah baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi agar dana yang diperoleh tidak hanya sekedar untuk kas kelompok yang hanya cukup untuk membiayai kegiatan kelompok seperti pelatihan dan rapat semata. Tetapi harus dalam bentuk modal usaha yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi kelompok UMKM untuk menciptakan unit-unit usaha baru guna pengembangan UMKM lebih lanjut kedepannya.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, yang dibutuhkan oleh kelompok UMKM saat ini adalah modal usaha itu sendiri. Sedangkan mengenai kebutuhan biaya untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kelompok sebenarnya dapat diatasi oleh anggota-anggota kelompok itu sendiri melalui iuran. Sejalan dengan itu, dalam temuan peneliti lebih lanjut diketahui bahwa saat ini pemerintah Kalurahan sedang mengajukan permohonan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan kepada pemerintah Provinsi DIY untuk membantu permodalan dalam pengembangan program Desa Preneur kedepannya. Menurut peneliti, upaya ini berpeluang untuk mendapatkan bantuan modal yang mempunyai dari pemerintah Provinsi DIY melalui BKK Dana Keistimewaan, sehingga keberlanjutan pengembangan UMKM kedepannya dapat dilakukan melalui program Desa Preneur tersebut.

Keempat, Pelatihan dan Pendampingan Kelompok UMKM. Pengetahuan dan keterampilan masyarakat sangat penting dalam proses pengembangan UMKM, karena dengan kemampuan tersebut masyarakat dapat mengembangkan inovasi, kreatifitas dan mampu mengoptimalisasi berbagai potensi yang ada guna mewujudkan kesejahteraannya. Oleh karenanya, pelaksanaan pelatihan atau workshop maupun penyuluhan menjadi dasar dalam proses pengembangan

pengetahuan dan keterampilan masyarakat guna pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Namun pelatihan tanpa dibarengi dengan pendampingan yang berkelanjutan akan kurang maksimal dalam pengembangan UMKM. Artinya, pelatihan dan pendampingan perlu dilaksanakan secara sinergis dan berkelanjutan guna memperoleh hasil yang maksimal.

Berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM, Herman Subagya selaku Carik Lumbungrejo menyatakan bahwa:

“Pelatihan terhadap kelompok UMKM itu sering dilakukan. Pihak-pihak yang menyelenggarakan pelatihan itu macam-macam, seperti dari Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman, Dinas Koperasi dan UMKM, dan bahkan ada juga yang dari pihak kampus. Sedangkan kalau pendampingan itu beberapa dari dinas terkait juga melakukan, tapi tidak intens. Jadi yang benar-benar mendampingi dan memantau perkembangan kelompok UMKM adalah pemerintah Kalurahan itu sendiri, kemudian dibantu juga oleh BUMKAL dan pengurus Desa Preneur”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pelatihan terhadap kelompok UMKM dilakukan oleh pihak eksternal seperti dari Dinas Koperasi dan UMKM DIY, Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Sleman, dan juga beberapa dari pihak kampus. Sementara pemerintah Kalurahan pada konteks ini berperan untuk menyediakan tempat pelatihannya. Menurut peneliti, kegiatan pelatihan dengan melibatkan pihak eksternal tersebut sangat baik, karena akan lebih memberikan variasi pengetahuan bagi masyarakat yang sesuai dengan keahlian mereka di bidangnya masing-masing. Namun, pendampingan dari pihak eksternal tersebut belum dilakukan secara intens, bahkan sama sekali tidak dilakukan. Sehingga peran pendampingan saat ini hanya

dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri, BUMKal dan pengurus Desa Preneur setempat.

Berdasarkan temuan peneliti, bentuk pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan untuk memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia para pelaku UMKM tersebut secara umum meliputi: pelatihan tentang kewirausahaan, pelatihan pengolahan hasil pangan, pelatihan manajemen bisnis, pelatihan strategi pemasaran, dan beberapa materi pelatihan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan ide dan konsep usaha, serta pengembangan inovasi dan kreatifitas pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lin Kotimah Iffah selaku anggota kelompok UMKM, yakni:

“Jadi dalam pelatihan itu kami dilatih supaya bisa membuat produk yang diolah dari hasil pangan, cara pemasaran online, manajemen bisnis, bagaimana membuat konsep usaha sesuai dengan peluang usaha yang ada, dan masih banyak lagi tergantung instansi atau dinas apa yang melakukan pelatihan. Manfaat dan dampak pelatihannya sangat positif karena mampu meningkatkan usaha-usaha masyarakat disini”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Dalam temuan peneliti menunjukkan bahwa pelatihan-pelatihan tersebut memiliki fungsi: 1) memotivasi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan usaha yang berbasis potensi lokal; 2) melatih masyarakat untuk mengolah hasil sumber daya alam yang ada agar menjadi produk-produk yang dapat dijual; melatih masyarakat agar mampu mengelola usahanya dengan baik, terutama dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran secara efisien; 3) melatih masyarakat agar mampu mengembangkan usahanya melalui strategi pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan teknologi digital secara *online*, seperti menjual di *marketplace* media sosial (menggunakan whatsapp bisnis, facebook, instagram dan tiktok) dan aplikasi (shopie, lazada, buka lapak,

tookpedia, dll); dan 4) menambah wawasan, ide dan konsep usaha agar masyarakat lebih inovatif dan kreatif dalam mengembangkan usahanya seperti mendesain logo usaha dan pamflet promosi yang menarik, membuat kemasan produk yang elegan, mengembangkan citra produk dan brand.

Menurut peneliti, jika dilihat dari fungsinya, maka bentuk pelatihan yang demikian sangat erat kaitannya dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Artinya, dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut dapat memotivasi dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan masyarakat agar mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan segala potensi sumber daya yang ada guna mewujudkan kesejahteraan mereka. Sebab dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa manfaat dan dampak dari pelatihan tersebut sangat dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat, terutama bagi para anggota kelompok UMKM. Misalnya, saat ini masyarakat secara perlahan sudah mampu mengelola dan memajemen usahanya secara lebih efektif dan efisien, dimana pengeluaran dan pemasukan dapat diatur dengan baik sehingga mereka mampu mengatasi akan potensi terjadinya kerugian atau kebangkrutan dalam berwirausaha. Selain itu, rata-rata pelaku usaha yang ada di Kalurahan Lumbungrejo saat ini sudah mampu mengembangkan usahanya baik secara konvensional maupun *online*, dimana semua itu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mereka karena pelanggan bisa datang membeli secara langsung di lokasi atau memesan (*order*) secara *online*.

Namun menurut peneliti, sekalipun kegiatan pelatihan terhadap kelompok UMKM berjalan lancar, hal ini tidak serta merta membuat masyarakat mampu beradaptasi dan mengembangkan potensi dirinya. Dalam perkembangannya,

menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian anggota kelompok UMKM yang sebenarnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Selain karena kurangnya modal usaha, hal ini juga dikarenakan pemahaman terkait manajemen usaha yang belum memadai. Oleh karenanya, pada konteks inilah pentingnya pendampingan yang secara intens dari pihak yang profesional di bidangnya setelah dilakukannya pelatihan, agar dapat memberikan bimbingan lebih lanjut dan memastikan sejauh mana perkembangan masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Sebab bimbingan dan pendampingan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kelurahan, BUMKal dan pengurus Desa Preneur belum maksimal dikarenakan mereka bukan ahlinya di bidang pengembangan UMKM itu sendiri maupun pengembangan sumber daya manusia.

B. Dampak Pengembangan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian

1. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa

Setiap kegiatan atau program yang dilakukan tentu harus dimuarakan pada pencapaian hasilnya, dimana dalam konteks pengembangan UMKM senantiasa diorientasikan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan para pelaku usaha dan masyarakat setempat pada umumnya. Berdasarkan dari berbagai informasi yang dihimpun peneliti, menunjukkan bahwa proses pengembangan UMKM di Kelurahan Lumbungrejo secara umum mengalami perkembangan dalam hal semakin meningkatnya pendapatan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan dampak pengembangan UMKM terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat, hal ini kemudian dipaparkan oleh M. Hisbah Alhakim selaku Lurah Lumbungrejo bahwa:

“Dengan berbagai upaya yang sudah dilakukan, sejauh ini nampaknya UMKM mengalami perkembangan yang cukup memuaskan dan itu sangat memberikan dampak positif dalam peningkatan pendapatan masyarakat Lumbungrejo secara umum. Salah satu yang paling memberikan dampak itu misalnya ketika ada event-event yang diselenggarakan di Lumbungrejo dan adanya pelatihan bagi kelompok UMKM, itu hasilnya sangat dirasakan secara langsung oleh para pelaku UMKM maupun masyarakat Lumbungrejo secara umum”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Dari pemaparan Lurah di atas, menerangkan bahwa pendapatan masyarakat, terutama para pelaku UMKM, secara umum mengalami peningkatan yang cukup memuaskan. Hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan UMKM, yaitu salah satunya melalui penyelenggaraan *event* yang mampu dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat setempat. Disamping itu, dengan adanya berbagai pelatihan yang telah diselenggarakan kemudian secara bertahap mampu meningkatkan produktifitas usaha masyarakat itu sendiri, misalnya melalui strategi pemasaran dan manajemen usahanya.

Lebih lanjut, perihal meningkatnya pendapatan ekonomi para pelaku UMKM, hal serupa juga dipaparkan oleh Nurhayati selaku Ketua UMKM bahwa:

“Sejauh ini usaha para anggota UMKM terus meningkat dan itu mempengaruhi hasilnya, yaitu pendapatan masyarakat mengalami peningkatan apalagi pada momen-momen event. Misalnya saya sendiri yang memiliki usaha jajanan seperti jualan aneka kue dan makanan ringan (snack) itu paling larisnya ketika ada event. Kalau hari biasa di luar event itu biasanya cuman dapat pemasukan sekitar Rp. 50.000 – 200.000 saja. Tapi kalau saat event, itu pendapatan saya sendiri biasanya lebih dari Rp. 500.000, bahkan mencapai jutaan. Begitu juga dengan anggota UMKM yang lainnya mengalami peningkatan pendapatan juga”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Hasil wawancara tersebut menyampaikan terkait dengan pendapatan pelaku usaha yang mengalami peningkatan signifikan ketika adanya *event*. Hal ini dilihat dari penghasilan harian di luar *event* yang pendapatannya hanya mencapai

Rp. 50.000 – 200.000 saja, dan ini lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan saat *event* yang mencapai Rp. 500.000 bahkan lebih dari 1 juta. Dengan demikian, menurut peneliti, upaya pengembangan UMKM melalui *event* juga memberikan kontribusi yang sangat menguntungkan para pelaku usaha karena jualannya akan lebih laris pada momen *event* tersebut.

Dalam temuan peneliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan para pelaku UMKM tidak hanya pada saat penyelenggaraan *event* semata, tetapi juga dipicu karena adanya bantuan fasilitas seperti payung kerucut, meja dan rombongan lapakan bagi pelaku usaha. Sehingga dengan adanya fasilitas penunjang tersebut juga mendorong antusiasme dan intensitas masyarakat dalam mengembangkan usaha-usahanya, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan baik secara harian maupun saat *event* yang cukup memuaskan bagi para pelaku usaha. Sejalan dengan ini, Dwi Sulastri sebagai pelaku UMKM juga menyapaikan bahwa:

“Ya kalau saat event itu sudah pasti meningkat pendapatannya, apalagi jika eventnya besar seperti konser atau kampanye-kampanye politik. Tapi kami tidak hanya berjualan saat event saja, setiap hari juga tetap jualan karena sudah disediakan payung kerucut dan meja serta rombongan lapakan, sehingga itu sangat membantu juga dalam mencari pemasukan harian. Walaupun tidak banyak pendapatan hariannya, tapi kalau dihitung-hitung hasilnya dalam satu minggu misalnya, sebenarnya lumayan juga. Jadi tergantung pelaku UMKM itu sendiri bagaimana mengatur keuangannya, toh kami juga sudah dilatih untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam usaha melalui kegiatan pelatihan-pelatihan itu”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa meningkatnya pendapatan masyarakat tidak serta merta saat berjualan ketika adanya *event* semata, tetapi dengan adanya bantuan fasilitas berupa payung kerucut, meja dan rombongan lapak bagi pelaku usaha juga memberikan dampak positif dalam memperlancar aktivitas

kewirausahaan masyarakat setempat. Selain itu, dengan adanya pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan strategi kewirausahaan, hal ini juga memberikan dampak positif yang mendorong masyarakat agar mampu memajemen usahanya dengan efektif, mengatur keuangannya secara efisien, mampu mengembangkan inovasi-inovasi dan melakukan promosi atau iklan yang mampu menarik minat para konsumen.

Menurut peneliti, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo secara umum memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha atau anggota kelompok UMKM yang ada, terutama dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan usahanya. Menurut peneliti, kemajuan usaha dan peningkatan pendapatan tersebut merupakan hasil positif dari keseluruhan proses dalam pengembangan UMKM itu sendiri. Hal ini dapat dilihat mulai dari pembentukan kelompok dan pengurus UMKM, kerja sama dengan pihak eksternal, penyelenggaraan *event*, pemberian fasilitas, pelatihan dan pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri. Dimana setiap kegiatan atau program tersebut memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi satu dan lainnya, serta secara bersamaan mampu memperkuat dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah masyarakat setempat yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat—terutama pendapatan para pelaku usaha tersebut—maka hal ini secara bertahap dapat menghantarkan masyarakat setempat dalam memperoleh kesejahteraannya. Sebab, dengan

meningkatnya pendapatan tersebut, maka masyarakat juga akan memiliki modal yang cukup dalam hal mengembangkan usahanya agar lebih maju dan besar, sehingga pada gilirannya mampu pula menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Dengan demikian, dampak dari pengembangan UMKM tersebut tidak hanya dinikmati oleh pelaku UMKM, tetapi juga oleh masyarakat Lumbungrejo secara umum guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Ketersediaan Lapangan Kerja

Selain untuk meningkatkan pendapatan para pelaku usaha, dampak dari pengembangan UMKM tentu harus berkolerasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun hal ini hanya akan bisa terwujud apabila usaha-usaha ekonomi masyarakat yang dikembangkan semakin maju dan besar. Artinya, dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya, hal ini menandakan bahwa proses pengembangan UMKM dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat setempat dan berkontribusi dalam menekan angka pengangguran di khususnya di Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri.

Berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja sebagai dampak dari proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, Herman Subagya selaku Carik Kalurahan Lumbungrejo menuturkan bahwa:

“Salah satu harapan terbesar dari pengembangan UMKM ini yaitu agar kedepannya mampu menciptakan lapangan pekerjaan khususnya bagi masyarakat Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri. Sejauh ini memang usaha UMKM terus berkembang maju, sehingga sebagian pelaku UMKM yang ada saat ini sudah mampu merekrut tenaga tambahan, dalam arti sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lainnya. Tetapi masing-masing UMKM baru bisa merekrut tenaga tambahan dalam jumlah yang masih kecil, yaitu 1-5 orang saja”. (Wawancara pada tanggal 22 April 2024).

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa keberadaan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo dalam perkembangannya saat ini beberapa diantaranya sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Namun secara jumlahnya masih relatif kecil, dimana setiap UMKM yang sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan tersebut hanya mampu merekrut tenaga kerja sebanyak 1-5 orang saja. Hal serupa juga disampaikan oleh Lin Kotimah Iffah sebagai pelaku UMKM, yakni:

“Kalau bicara soal penciptaan lapangan pekerjaan dari UMKM itu sendiri sudah berjalan. Sebagai contoh, saya sendiri punya usaha kulineran dan sekarang sudah merekrut 4 orang karyawan atau pekerja. Sama halnya dengan UMKM yang lainnya, rata-rata sudah ada karyawannya, ada yang 2 orang dan ada juga yang 5 orang. Tapi sepertinya belum ada yang lebih dari 10 orang. Bahkan yang bergerak di usaha hotel atau *home stay* sekalipun, itu jumlah karyawannya cuman sekitar 5-7 orang saja”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Kemudian, hal yang sama dalam kaitannya dengan ketersediaan lapangan kerja juga diterangkan lebih lanjut oleh Nurhayati selaku ketua kelompok UMKM, yakni:

“Saya sendiri punya usaha *catering*. Nama *brand*-nya itu adalah *LeeNok Food & Catering*. Pada awal merintis usaha ini, saya kerjakan sendiri. Tapi karena pelanggan terus bertambah dan jumlah pesanan semakin banyak, akhirnya saya merekrut tenaga tambahan untuk membantu saya dalam menjalankan usaha ini. Awalnya saya cuman merekrut 1 orang karyawan saja, dan saat ini sudah ada 3 orang karyawan”. (Wawancara pada tanggal 25 April 2024).

Berangkat dari uraian tentang ketersediaan lapangan pekerjaan dalam proses pengembangan UMKM di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa UMKM yang sudah mampu merekrut tenaga kerja saat ini secara rata-rata masih dalam skala 3-5 orang karyawan. Menurut peneliti, walaupun kemampuan setiap UMKM yang ada saat ini baru bisa merekrut tenaga kerja dalam skala jumlah yang masih relatif kecil, namun setidaknya sudah mampu menyediakan lapangan

pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang masih menganggur di Kalurahan Lumbungrejo. Hal ini sejalan dengan temuan peneliti lebih lanjut di lapangan, yang secara umum menunjukkan bahwa jumlah karyawan dalam setiap UMKM yang ada di Kalurahan Lumbungrejo masih rendah, yaitu masih di bawah di bawah 10 orang.

Menurut peneliti, dalam perkembangan lebih lanjut kedepannya, tidak menutup kemungkinan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kalurahan Lumbungrejo akan terus bertambah dan meningkat seiring dengan proses pengembangan usaha-usaha ekonomi (UMKM) masyarakat yang terus maju dan membesar. Untuk saat ini saja, jika dihitung secara matematik, jumlah anggota kelompok UMKM saat ini yaitu 43 orang. Katakanlah setiap pelaku UMKM tersebut sudah mampu merekrut karyawan minimal sebanyak 3 orang, maka setidaknya UMKM di Kalurahan Lumbungrejo telah menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak 129 orang untuk masyarakat setempat yang masih menganggur. Dalam hal ini, peneliti berpandangan bahwa jumlah pelaku UMKM di Kalurahan Lumbungrejo pun berpotensi terus bertambah, sehingga prospek penyediaan lapangan pekerjaan kedepannya secara bertahap akan terus meningkat pula.

Namun dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa belum semua UMKM di Kalurahan Lumbungrejo mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat lainnya. Sebagian UMKM yang ada masih dijalankan secara sendiri oleh pelaku usahanya. Sebab jenis usaha masyarakat setempat secara umum adalah usaha kulineran, jualan jajanan pasar, olahan salak, jualan gorengan, catering, dan warung-warung atau kios kecil. Sehingga dengan jenis usaha yang

demikian masih bisa dikerjakan secara sendiri oleh pelaku usahanya, dan apabila membutuhkan tenaga bantuan tentu jumlahnya hanya berkisar 1-5 orang saja.

Oleh karenanya, dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan dalam proses pengembangan UMKM tersebut, harapan kedepannya yaitu usaha-usaha ekonomi masyarakat dapat terus berkembang maju sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas di Kalurahan Lumbungrejo. Dengan demikian, maka UMKM dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hal ini tentu membutuhkan peran serta dan kolaborasi dari pemerintah Kalurahan, masyarakat setempat dan stakeholder lainnya agar bersama-sama meningkatkan perekonomian lokal pedesaan yaitu salah satunya melalui pengembangan UMKM itu sendiri.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, Kalurahan Lumbungrejo sejatinya memiliki beberapa faktor pendukung yang dapat menunjang proses pengembangan UMKM setempat. Adapun beberapa faktor pendukung yang dimaksudkan yaitu antara lain: 1) tersedianya kelompok UMKM sebagai wadah yang mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya; 2) tersedianya potensi pangan lokal yang dapat diolah oleh masyarakat sebagai komoditas usahanya; dan 3) memiliki potensi pasar yang strategis. Hal ini sesuai dengan pernyataan M. Hisbah Alhakim selau Lurah Lumbungrejo, yakni:

“Kalau mengenai faktor pendukung, adanya kelompok UMKM itu bertujuan untuk mendukung produktivitas pelaku usaha. Selain itu, komoditas pangan lokal dan pasar Tempel itu juga merupakan potensi

yang dimiliki Kalurahan Lumbungrejo dalam mendukung perkembangan UMKM di sisni”. (Wawancara, 22 April 2024).

Pertama, tersedianya kelompok UMKM. Dalam hal ini, keberadaan kelompok UMKM itu sendiri jika dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha, tentu saja dapat memberikan dampak positif bagi mereka dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan produktivitas usahanya secara berkelanjutan. Namun, menurut peneliti, kelompok UMKM tersebut dapat memberikan kontribusi positif apabila para anggota di dalamnya mampu menciptakan kegiatan-kegiatan yang produktif, yaitu seperti kegiatan diskusi maupun pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan UMKM itu sendiri. Artinya, masyarakat setempat khususnya bagi para pelaku UMKM perlu memanfaatkan kelompok UMKM dan mengoptimalkan hasil dari kegiatan di dalamnya guna mendukung aktivitas usaha mereka. Sehingga keberadaan kelompok UMKM dalam konteks ini tidak sekedar formalitas semata, melainkan sebagai wadah kolektif bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya secara bersama-sama.

Kedua, tersedianya potensi pangan lokal. Temuan peneliti menunjukkan bahwa Kalurahan Lumbungrejo mempunyai potensi pangan lokal yang menghasilkan berbagai varian komoditas unggulan. Di mana komoditas tersebut dapat diolah oleh masyarakat setempat menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis guna mendukung proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Berkaitan dengan komoditas pangan yang ada di Kalurahan Lumbungrejo, hal ini kemudian dipaparkan oleh Handayatman selaku pengurus BUMKAL Lumbungrejo bahwa:

“Sebenarnya ada banyak sekali hasil pangan yang bisa diolah oleh masyarakat untuk dijadikan berbagai macam produk unggulan di Lumbungrejo ini. Misalnya buah salak, klengkeng, durian, semangka, cabai, pisang, ubi-ubian, singkong, kacang tanah, kacang kedelai, dan berbagai aneka sayur-mayur”. (Wawancara, 22 April 2024).

Dari pemaparan di atas, diketahui bahwa Kalurahan Lumbungrejo memiliki potensi pangan lokal seperti buah salak, klengkeng, durian, semangka, cabai, pisang, ubi-ubian, kacang tanah, kacang kedelai, berbagai aneka sayur-mayur dan lain sebagainya. Di mana hasil pangan tersebut dapat diolah oleh masyarakat setempat untuk menjadikan berbagai produk yang bisa dijual ke pasar. Sebagai contoh, komoditas seperti pisang, kacang, dan singkong dan ubi-ubian lainnya telah diolah oleh masyarakat setempat menjadi keripik maupun kerupuk. Kemudian kacang kedelai juga diolah menjadi tempe, cabai diolah menjadi berbagai aneka sambal dalam kemasan, begitu juga dengan buah-buahan yang diolah menjadi berbagai aneka jus. Artinya, potensi pangan lokal tersebut telah menjadi bahan olahan masyarakat dalam melakukan aktivitas kewirausahaan di Kalurahan Lumbungrejo. Karena banyak komoditas pangan lokal yang telah dijadikan produk usaha oleh para pelaku UMKM setempat, sehingga pemanfaatan dan optimalisasi potensi pangan lokal tersebut dapat memberikan cuan atau pendapatan ekonomis bagi masyarakat setempat apabila dikelola dengan baik dan berkelanjutan.

Ketiga, potensi pasar yang strategis. Sejalan dengan yang telah peneliti uraikan dalam Bab II pada bagian kondisi geografis, di mana Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri merupakan Ibu Kota dari Kapanewon Tempel, karena letaknya berada di pusat keramaian yang dekat dengan Balai Kapanewon

setempat. Selain itu, pasar Kapanewon Tempel itu sendiri berada di dalam wilayah Kalurahan Lumbungrejo itu sendiri, sehingga hal ini membuat Kalurahan Lumbungrejo memiliki potensi pasar yang lebih strategis jika dibandingkan dengan Kalurahan lainnya yang berada di Kapanewon Tempel. Berkaitan dengan potensi pasar yang strategis dalam pengembangan UMKM, hal serupa juga dituturkan oleh Nurhayati selaku ketua UMKM Kalurahan Lumbungrejo bahwa:

“Jadi beruntung sekali karena Kalurahan Lumbungrejo ini berada di pusat kota Kapanewon, sehingga mempunyai potensi pasar yang bisa dibilang lumayan strategis dibandingkan dengan kalurahan lainnya di Kapanewon Tempel. Karena kita dengan dengan pasar Tempel, Balai Kecamatan, Puskesmas, sekolah-sekolah, Kantor Polsek Tempel, Koramil, dan instansi tingkat kecamatan lainnya”. (Wawancara, 25 April 2024).

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa keberadaan Kalurahan Lumbungrejo berada di pusat kota Kapanewon Tempel, yang di dalamnya terdapat berbagai institusi tingkat Kapanewon/Kecamatan seperti Pasar Tempel, Balai Kecamatan, Puskesmas, sekolah-sekolah, Kantor Polsek Tempel, Koramil, dan lain sebagainya. Sehingga hal ini juga menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang ramai, yang membuat Kalurahan Lumbungrejo memiliki potensi pasar yang strategis dan menjadi pusat perekonomian Kapanewon Tempel. Menurut peneliti, karena Kalurahan Lumbungrejo memiliki potensi pasar yang strategis tersebut, hal ini akan menjadi daya dukung yang signifikan dalam proses pengembangan UMKM itu sendiri. Sebab, para pelaku UMKM setempat mempunyai akses pasar yang memadai dalam mengembangkan usaha mereka, tinggal bagaimana mereka memaksimalkan potensi pasar tersebut untuk mendukung kelancaran usaha mereka secara berkelanjutan kedepannya.

2. Faktor Penghambat

Setiap program dan usaha yang dilakukan tentu saja mengalami berbagai kendala maupun faktor penghambat tertentu. Dalam konteks pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, juga mengalami berbagai kendala yang menghambat upaya pengembangan UMKM menjadi tidak maksimal. Berkaitan dengan faktor penghambat dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, hal ini disampaikan oleh Herman Subagya selaku Carik Kalurahan Lumbungrejo bahwa:

“Pelaku UMKM masih mengalami kesulitan modal usaha dan fasilitas pendukung dalam mengembangkan usahanya, Kelompok UMKM juga belum berjalan sesuai tujuan yang diharapkan karena anggota-anggota di dalamnya kurang aktif dalam kegiatan kelompok, lalu pemanfaatan terhadap potensi lokal juga masih minim”. (Wawancara, 22 April 2024).

Hal serupa juga dituturkan oleh Dwi Sulastri selaku anggota kelompok UMKM bahwa:

“Salah satu kendalanya itu adalah masalah modal dan fasilitas penunjang. Selain itu, pelatihan di dalam kelompok UMKM belum berjalan efektif sehingga para pelaku UMKM masih minim inovasi dalam mengembangkan usahanya, serta pendampingan dan perhatian dari pemerintah Kalurahan juga masih lemah sehingga masih banyak kebutuhan kelompok UMKM yang belum terakomodir”. (Wawancara, 25 April 2024).

Berangkat dari pernyataan kedua narasumber di atas, diketahui bahwa faktor-faktor yang menghambat penyelenggaraan strategi pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo yaitu meliputi: kurangnya modal usaha dan fasilitas pendukung bagi para pelaku usaha, kelompok UMKM belum berjalan efektif karena sebagian anggotanya masih kurang aktif, pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah Kalurahan juga belum maksimal sehingga kebutuhan-kebutuhan para

pelaku UMKM belum terakomodasi secara maksimal, serta masih minimnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha sehingga inovasi yang dilakukan dalam pengembangan UMKM belum maksimal. Menurut peneliti, berbagai faktor penghambat tersebut di atas sangat mempengaruhi proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo saat ini, sehingga proses pengembangannya belum berjalan efektif dan maksimal. Dalam hal ini, penyebab utamanya yaitu terletak pada tingkat kesadaran pelaku UMKM itu sendiri yang belum mengoptimalkan keberadaan kelompok UMKM sebagai sarana edukasi, koordinasi dan komunikasi mereka dalam mengembangkan usahanya.

Selain itu, pemerintah Kalurahan selaku pembuat kebijakan dan regulator juga belum memainkan peranan yang signifikan dalam melakukan pendampingan dan memfasilitasi kebutuhan para pelaku UMKM dan kelompok UMKM yang ada. Sehingga ketidakberdayaan masyarakat dalam mengembangkan usahanya hingga saat ini belum terakomodir dengan baik. Hal ini juga tidak terlepas dari kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kalurahan dan kelompok UMKM dalam melaksanakan berbagai upaya pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Sehingga sinergitas antara pemerintah Kalurahan dan pelaku usaha dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo belum berjalan maksimal, yang pada gilirannya membuat kinerja UMKM belum mampu memberikan dampak ekonomis yang signifikan bagi peningkatan perekonomian Kalurahan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini berjudul “Strategi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah” yang dilakukan di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan judul tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada: 1) Strategi Pemerintah Kalurahan Dalam Pengembangan UMKM; 2) Dampak Pengembangan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian; dan 3) Faktor Pendukung dan Penghambat. Adapun kesimpulan dari ketiga hasil penelitian tersebut, akan diuraikan di bawah ini.

Pertama, pemerintah Kalurahan telah menerapkan beberapa strategi dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo, yaitu: 1) rencana pembangunan *rest area*; 2) berkerja sama dengan pihak eksternal; 3) pengembangan konsep Desa Preneur; dan 4) penyelenggaraan *event*. Dalam temuan peneliti, keempat strategi tersebut jika diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan tentunya akan memberikan dampak yang positif dalam proses pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Namun dalam perkembangannya saat ini, yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yaitu hasil dari kerja sama dengan pihak eksternal dan penyelenggaraan *event*. Sementara dalam pembangunan *rest area* dan pengembangan konsep Desa Preneur saat ini masih pada tahap perencanaan, tetapi jika dilihat dari tujuannya

yaitu bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengembangkan usaha-usahanya.

Lebih lanjut, pemerintah Kalurahan juga memfasilitasi para pelaku usaha dalam beberapa hal, yakni: 1) pembentukan kelompok dan pengurus UMKM, yaitu bertujuan untuk menjadi wadah bagi masyarakat dalam berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai peluang dan hambatan yang dialami dalam berwirausaha, untuk memudahkan proses pengorganisasian, penyerapan aspirasi, pembinaan dan pelatihan guna meningkatkan produktifitas usaha masyarakat setempat; 2) pemberian fasilitas penunjang, yaitu berupa payung kerucut, meja dan lapak jualan bagi para pelaku usaha yang membutuhkan guna memotivasi dan meningkatkan intensitas masyarakat dalam berwirausaha; 3) permodalan, pada konteks ini pemerintah Kalurahan tidak memberikan bantuan modal, tetapi turut mengusahakan melalui kerja sama dengan pihak eksternal agar masyarakat dapat mengakses modal; dan 4) pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok UMKM, kegiatan pelatihan berjalan lancar dan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengembangkan usahanya agar lebih produktif, tetapi dalam hal pendampingan masih kurang intends dilakukan sehingga beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok UMKM tidak dapat tertangani dengan cepat.

Kedua, dampak pengembangan UMKM dalam peningkatan ekonomi masyarakat sejauh ini masih belum signifikan dan komprehensif. Tetapi secara bertahap, khususnya pendapatan para pelaku UMKM dari hasil usahanya sudah mengalami peningkatan. Bahkan beberapa usaha masyarakat yang semakin maju dan berkembang ini juga telah memberikan dampak yang luas bagi masyarakat

Lumbungrejo secara umum, yaitu melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi beberapa masyarakat yang masih menganggur. Namun penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya belum bisa dilakukan oleh semua UMKM yang ada di Kalurahan Lumbungrejo, tetapi sebagian UMKM sudah memiliki karyawan sekitar 3-5 orang. Tentu saja hal ini sangat bergantung pada proses pengembangan UMKM saat ini, apabila usaha masyarakat akan terus maju dan membesar maka tentu akan membutuhkan tenaga tambahan, sehingga hal ini dapat memberikan dampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas guna mewujudkan kesejahteraan bersama.

Ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Lumbungrejo. Adapun faktor pendukungnya yaitu meliputi: tersedianya kelompok UMKM sebagai wadah yang mendukung pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, tersedianya potensi pangan lokal yang dapat diolah oleh masyarakat sebagai komoditas usahanya, dan memiliki potensi pasar yang strategis karena Kalurahan Lumbungrejo merupakan pusat Ibu Kota Kapanewon Tempel. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu antara lain: kurangnya modal usaha dan fasilitas pendukung bagi para pelaku usaha, kelompok UMKM belum berjalan efektif karena sebagian anggotanya masih kurang aktif, pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah Kalurahan juga belum maksimal sehingga kebutuhan-kebutuhan para pelaku UMKM belum terakomodasi secara maksimal, serta masih minimnya kegiatan pelatihan bagi pelaku usaha sehingga inovasi yang dilakukan dalam pengembangan UMKM belum maksimal.

B. Saran

Adapun saran peneliti dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Pemerintah Kalurahan Lumbngrejo perlu menjalin berkoordinasi yang lebih intens lagi dengan kelompok UMKM agar dapat mengetahui perkembangan usaha masyarakat dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha guna dicarikan solusinya secara bersama-sama.
2. Kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah Kalurahan, Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), kelompok UMKM dan lembaga atau dinas terkait perlu ditingkatkan dan dilakukan secara berkelanjutan agar semuanya dapat memberikan kontribusi yang berarti berdasarkan tupoksinya masing-masing dalam proses pengembangan UMKM.
3. Pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan secara sinergis dan berkelanjutan, melalui kegiatan penyuluhan yang lebih *up to date* dengan perkembangan situasi guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, inovasi dan kreatifitas masyarakat dalam merespon setiap peluang ekonomi yang ada.
4. Masyarakat setempat dan juga kelompok UMKM perlu mengembangkan usaha yang berbasis potensi sumber daya lokal dan mengolah komoditas pangan yang ada guna menghasilkan berbagai produk unggulan Kalurahan.
5. Pemerintah Kalurahan perlu memfasilitasi modal usaha dan fasilitas pendukung bagi kelompok UMKM, meningkatkan pola koordinasi dan komunikasi dengan pelaku UMKM untuk mengakomodir kebutuhan

mereka, dan kelompok UMKM itu sendiri mesti berinisiatif secara mandiri dalam mencari sumber-sumber modal seperti menggunakan fasilitas pinjaman usaha dari berbagai pihak guna memperoleh dana yang dibutuhkan dalam upaya memperluas usaha kelompoknya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- A. Kadim dan Nardi, Sunardi. 2020. “*Kinerja Keuangan dengan metode Economic Value Added (EVA), Financial Value Added (FVA) dan Market Value Added (MVA) (Studi pada Industri Telekomunikasi di Indonesia yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2018)*”, Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi).
- A.J. Suhardjo. 2008. “*Geografi Perdesaan Sebuah Antologi*”. Yogyakarta: Ideas Media.
- Abdul, Halim. 2020. “*Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju STIE Muhammadiyah, Mamuju*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol. 1 No. 2, Juli 2020.
- Adriani, Alief Ramdan. 2020. “*Analisis Pemeriksaan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2016-2018*”. Jurnal Pajak Vokasi Vol. 1 No. 2, Maret 2020, pp.pp 79-85 E-ISSN: 2686 – 2585.
- Afriansyah, dkk. 2023. “*Pemberdayaan Masyarakat*”. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Akbar, F. H; Hamid, D. & Djudi, M. 2016. “*Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Tetap PG Kebon Agung Malang)*”. Jurnal Administrasi Bisnis.
- Akbari, Muhammad Safar. 2023. “*Strategi Pemerintah Desa Berbasis Pemberdayaan perempuan dalam peningkatan pendapatan masyarakat di UMKM*”. Jurnal Dinamika Pemerintahan, Vol. 6 No. 2.
- Anggraeni, Feni Dwi dan Imam, H. A. Hayat. 2017. “*Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Fasilitas Pihak Eksternal dan Potensi Internal*”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 4.
- Astuti, S. D; Waluyo, D. E & Subagyo, H. 2020. “*Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Wirausaha Aisyiah Kabupaten Semarang*”. Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Chrismardani, Y. 2014. “*Komunikasi Pemasaran Terpadu: Implementasi untuk UMKM*”. Jurnal Berkala Ilmu Ekonomi, Vol. 8 No. 2.
- Christian, M & Merisa, M. 2020. “*Peranan Inovasi Sebagai Mediator Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah Asesoris Gawai Di Roxy Mas Jakarta*”. Jurnal Pengabdian Dan Kewirausahaan.

- Dewi, S. P & Hidayat, R. 2019. “*Pengaruh Net Profit Margin dan Return on Assets terhadap Harga Saham pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia*”. Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen.
- Faisal, Amri Ahmad. 2012. “*Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Gedi (Abelmoschus manihot, L.) terhadap Kadar Glukosa Darah Tikus Putih Galur Wistar*”. Yogyakarta: Skripsi Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA UNY.
- Hamzah, Lies Maria & Devi Agustien. 2019. “*Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia*”. JEP-Vol. 8 No. 2 Juli 2019.
- Humaira, I & Sagoro, E. M. 2018. “*Pengaruh Pengetahuan Keuangan, dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Perilaku UMKM Sentra Kerajinan Batik Kabupaten Bantul*”. Jurnal Nominal.
- Huzaifi, A; Hanifah, F; Aldini Harkart, M; dkk. 2022. “*Peran Sumber Daya Manusia Dalam Mengembangkan Kinerja Pada UMKM Griya*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Mengabdi.
- Inderasari, Oryza P; Hamdi Saiful, Syarifuddin and Ikmal Maulana. "Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Suralaga Lombok Timur." Jurnal Kebijakan Pembangunan.
- Lecerf, M. A. 2012. “*Internationalization and innovation: The effects of a strategy mix on the economic performance of French SMEs*”. Jurnal: *International Business Research*.
- Lina, Maulidiana. 2018. “*Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan*”. Bandar Lampung: Anugra Utama Raharja.
- Mulgan, Geoff. 2008. “*The Art of Public Strategy Mobilizing Power and Knowledge For the Common Good*”. New York: Oxford University.
- Mustanir, Hamid & Syarifuddin. 2019. “*Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Wanita Tani Edisi Pertama*”. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Nugroho, Hanantyo Sri. 2018. “*Democratic Governance (Studi mengenai Governability dalam Pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta)*”. Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, Vol. 6 No. 1.
- Pujiono, Arif. 2020. “*Strategi Pengembangan UMKM Halal di Jawa Tengah Dalam menghadapi Persaingan Global*”. *Indonesia Journal of Halal*, Vol. 1, No. 1, pp. 1-7.
- Purnamawati, I. G. A. 2019. “*Akuntansi dan Implementasinya dalam Koperasi dan UMKM*”. PT. Raja Grafindo Persada.

- Putra, K. Mahendara dan I. Gusti A. D. Adnyani. 2016. “*Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan OCB Terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Komitmen Organisasi*”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana Bali.
- Rohmah, Nikmatur dan Saiful, Walid. 2014. “*Proses Keperawatan Teori dan Aplikasi*”. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Setiyani, Asri. 2022. “*Pengembangan UMKM di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo*”. Ural Imiah Multidisiplin, Vol. 1, No. 3.
- Sianturi, Ronda Deli. 2020. “*Manajemen Pemasaran Menggunakan Analisis SWOT pada UMKM guna Meningkatkan Daya Saing UMKM*”. Jurnal Of Business And Economics Research, Vol. 1 No. 1.
- Sofjan. 2017. “*Manajemen Pemasaran*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tulusan, Femi M. G dan Londa, Very Y. 2014. “*Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum.
- Winda, Suci; Lestari, Nasution; dkk. 2021. “*Membangkitkan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*”. Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 8 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan/Status :

- 1) Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Masyarakat
 - a) Pemberian Fasilitas Terhadap Pelaku UMKM
 1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM di kalurahan lumbungrejo?
 2. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa terhadap pelaku UMKM?
 - b) Pelatihan dan Pendampingan Terhadap Pelaku UMKM
 1. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan permodalan?
 2. Apakah ada program (sebutkan) pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM?
- 2) Dampak Pengembangan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
 - a) Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa
 1. Bagaimana dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
 2. Bagaimana perkembangan UMKM dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa?
 - b) Ketersediaan Lapangan Kerja
 1. Apakah dengan adanya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?

Nama : M. Hisbah Alhakim

Umur : 48 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan/Status : Lurah Lumbungrejo

- 1) Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan UMKM Masyarakat
 - a) Pemberian Fasilitas Terhadap Pelaku UMKM
 1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam mengembangkan UMKM di kalurahan lumbungrejo?
 2. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa terhadap pelaku UMKM?
 - b) Pelatihan dan Pendampingan Terhadap Pelaku UMKM
 1. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan permodalan?
 2. Apakah ada program (sebutkan) pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM?
- 2) Dampak Pengembangan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat
 - a) Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa
 1. Bagaimana dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
 2. Bagaimana perkembangan UMKM dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa?
 - b) Ketersediaan Lapangan Kerja
 1. Apakah dengan adanya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?

Nama : Herman Subagya
Umur : 46 Tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan/Status : Carik Lumbungrejo

1. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan permodalan?
2. Apakah ada program (sebutkan) pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM?
3. Bagaimana perkembangan UMKM dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa?
4. Apakah dengan adanya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?

Nama : Handayatman
Umur : 59 Tahun
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan/Status : Pengurus BUMKAL

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa terhadap pelaku UMKM?
2. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan permodalan?
3. Apakah ada program (sebutkan) pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM?
4. Bagaimana dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
5. Bagaimana perkembangan UMKM dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Nama : Nurhayati

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan/Status : Pelaku UMKM

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa terhadap pelaku UMKM?
2. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan permodalan?
3. Apakah ada program (sebutkan) pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM?
4. Bagaimana dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
5. Bagaimana perkembangan UMKM dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa?
6. Apakah dengan adanya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?

Nama : Lin Kotimah Iffah

Umur : 38 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan/Status : Pelaku UMKM

1. Fasilitas apa saja yang diberikan pemerintah desa terhadap pelaku UMKM?
2. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan permodalan?
3. Apakah ada program (sebutkan) pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM?
4. Bagaimana dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?

Nama : Dwi Sulastri, S.Si

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan/Status : Pelaku UMKM

1. Apakah pemerintah desa memfasilitasi pelaku UMKM dengan memberikan permodalan?
2. Apakah ada program (sebutkan) pelatihan dan pendampingan untuk pelaku UMKM?
3. Bagaimana dampak UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat?
4. Apakah dengan adanya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat?

Surat Permohonan Ijin Penelitian



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B**

Alamat Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax (0274) 515989, website www.apmd.ac.id, e-mail info@apmd.ac.id

Nomor : 242/I/U/2024
Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :
Lurah Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : 18520080
No Mhs : Fugensius Arianto Mone
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembagnn Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Studi Kasus di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)
Tempat : Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 8 Maret 2024
Ketua

Dr. Sutarno Eko Yunanto
170 230 190

Surat Tugas Penelitian

**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA**
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

1. Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (YPP) didirikan pada tanggal 15 Mei 1978.
2. Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (YPP) memiliki status badan hukum sebagai Yayasan.
3. Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (YPP) memiliki status sebagai Badan Hukum Milik Perorangan.
4. Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (YPP) memiliki status sebagai Badan Hukum Milik Perorangan.
5. Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (YPP) memiliki status sebagai Badan Hukum Milik Perorangan.

Alamat : Jl. Temoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515669, website: www.apmd.ac.id, e-mail: info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 110/I/1/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : 18520080
Nomor Mahasiswa : Fugensius Arianto Mone
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.

a. Tempat : Kalurahan Lumbunrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman
b. Sasaran : Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Studi Kasus di Kalurahan Lumbunrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.


Yogyakarta, 8 Maret 2024
Ketua
Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Balasan Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KAPANEWON TEMPEL
PEMERINTAH KALURAHAN LUMBUNGREJO

Di Di Pnggawong nggawong nggawong

Jalan Magelang Km 18, Lumbungrejo, Tempel, Sleman, 55552

Lumbungrejo, 11 Maret 2024

Nomor : 420/008-1
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dr. Sutopo Eko Yudianto
Di APMD Yogyakarta

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Bapak/Ibu Nomor 242/U/2024 tentang Permohonan Izin Penelitian, yang rencananya akan dilaksanakan di wilayah Kalurahan Lumbungrejo, dengan ini kami selaku Pemerintah Kalurahan Lumbungrejo mengizinkan penelitian yang berjudul Strategi Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa (Studi Kasus di Kalurahan Lumbungrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta) yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : Fugensius Arianto Mone
Nomor Mahasiswa : 18520080
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Dosen Pembimbing : Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Hasil Turnitin Tugas Akhir



Lumbung Desa STPMD "APMD"
Perpustakaan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"
Jl. Timoho 317 Gondosuman Yogyakarta 55225
Email: perpustakaan@gmail.com telp/WA: 0851-7320-3177

TANDA TERIMA CEK PLAGIASI

Tanda terima ini menyatakan bahwa Lumbung Desa Perpustakaan STPMD "APMD" telah menerima makalah anda dan telah memeriksanya melalui perangkat lunak Turnitin dengan rangkuman berikut:

Penulis Makalah: Fugensius Arianto Mone
Judul makalah: STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus di Kalurahan Lumbungrejo Kec.Tempel)
Tanggal pemeriksaan: 23 Juli 2024
Persentase plagiasi: 23%

 Petugas: Checked By:
Indriantho Prabowo 

Dokumentasi Lapangan

Wawancara Lurah



Wawancara Carik



Wawancara Pengurus BUMKAL



Wawancara Pelaku UMKM



Wawancara Pelaku UMKM



Payung Kerujut dan Meja UMKM



Rombong Lapak UMKM



Event dan Bazar UMKM



Event dan Produk UMKM



Event dan Produk UMKM



Event dan Produk UMKM



Produk UMKM



Produk UMKM

